

**OPTIMALISASI POTENSI RETRIBUSI PARIWISATA
PANTAI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DI
KABUPATEN BLITAR
(STUDI KASUS PANTAI TAMBAKREJO,
PANTAI SERANG, DAN PANTAI JOLOSUTRO)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

**EKY PRISTA
(135020100111033)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Optimalisasi Potensi Retribusi Pariwisata Pantai Terhadap Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro)"

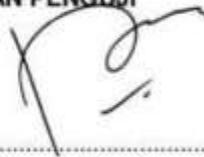
Yang disusun oleh :

Nama : Eky Prista
NIM : 135020100111033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **29 Oktober 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr.re.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
NIP. 196912101997031003
(Dosen Pembimbing)
2. Atu Bagus Wiguna, SE., ME.
NIP. 2016079101181001
(Dosen Penguji I)
3. Dr.rer.pol. Ferry Presetyia, SE., M.App.Ec.
NIP. 198012282005011002
(Dosen Penguji II)



Malang, 10 November 2020
Ketua Program Studi
S1 Ekonomi Pembangunan,




Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 196503111989032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **EKY PRISTA**
Tempat, tanggal lahir : **Blitar, 08 Desember 1994**
NIM : **135020100111033**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**
Program Studi : **S1 Ekonomi Pembangunan**
Konsentrasi : **Perencanaan Pembangunan**
Alamat : **Jalan Raya Candi II Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Optimalisasi Potensi Retribusi Pariwisata Pantai Terhadap Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro)

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Oktober 2020

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



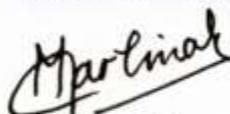
Dr.rer.pon Wildan Syafitri ,SE.,ME.
NIP. 196912101997031003

Yang membuat pernyataan,



Eky Prista
NIM. 135020100111033

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty ,M.Si., Ph.D.
NIP . 196503111989032001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Otonomi Daerah	10
2.2 Otonomi Desa	11
2.3 Keuangan Daerah	14
2.4 Pendapatan Asli Daerah	15
2.5 Pendapatan Asli Desa	16
2.6 Retribusi Daerah	17
2.7 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	19
2.8 Ekonomi Pariwisata	20
2.9 Barang Publik	23
2.10 Penelitian Terdahulu	24
2.11 Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Data dan Sumber Data	30



3.5 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.6 Metode Analisis Data.....	31
3.6.1 Analisis Potensi Retribusi Daerah.....	31
3.6.2 Forecasting ARIMA Box-Jenkins.....	32
3.6.3 Analisis SWOT.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Kabupaten Blitar.....	37
4.2 Karakteristik Kependudukan Kabupaten Blitar.....	42
4.3 Karakteristik Potensi Daerah.....	46
4.4 Gambaran Umum Pariwisata.....	48
4.4.1 Pantai Tambakrejo.....	48
4.4.2 Pantai Serang.....	49
4.4.3 Pantai Jolosutro.....	50
4.5 Hasil dan Pembahasan.....	51
4.5.1 Analisis Potensi Retribusi Pariwisata.....	51
4.5.2 Forecasting ARIMA Box-Jenkins.....	58
4.5.3 Strategi Pengembangan.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran dan Rekomendasi.....	75
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber-Sumber Pendapatan Desa dan Daerah	14
Tabel 4.1	Pembagian Adminitratif Kabupaten Blitar	38
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	43
	Kabupaten Blitar Tahun 2018.....	43
Tabel 4.3	Potensi Retribusi Tempat Wisata Pantai Kabupaten Blitar....	52
Tabel 4.4	Bagi Hasil Retribusi Sebelum dan Sesudah MOU	53
	Tahun 2018	53
Tabel 4.5	Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata....	54
	Pantai Tambakrejo Tahun 2015-2019.....	54
Tabel 4.6	Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata....	55
	Pantai Serang Tahun 2015-2019.....	55
Tabel 4.7	Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata....	57
	Pantai Jolosutro Tahun 2015-2019	57
Tabel 4.8	Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) Pantai Tambakrejo	59
Tabel 4.9	ACF dan PACF Pantai Tambakrejo Tingkat Differencing.....	60
Tabel 4.10	Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter.....	60
	Model ARIMA Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo	60
Tabel 4.11	Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo ..	61
Tabel 4.12	Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) Pantai Serang.....	63
Tabel 4.13	ACF dan PACF Pantai Serang Tingkat Differencing.....	63
Tabel 4.14	Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter.....	64
	Model ARIMA Penerimaan Retribusi Pantai Serang	64
Tabel 4.15	Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Serang	65
Tabel 4.16	Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) Pantai Jolosutro...	67
Tabel 4.17	ACF dan PACF Pantai Jolosutro Tingkat Differencing.....	67
Tabel 4.18	Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter.....	68
	Model ARIMA Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro	68

Tabel 4.19 Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Joloesuro 69

Tabel 4.20 Faktor Internal dan Eksternal Pengelolaan Wisata Pantai..... 70

Tabel 4.21 Analisis SWOT Pariwisata Pantai di Kabupaten Blitar 71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar (milliar rupiah), 2013-2018	2
Gambar 1.2	Realisasi Penerimaan Komponen PAD Kabupaten Blitar.. (milliar rupiah), 2013-2018.....	3
Gambar 1.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2013-2018.....	4
Gambar 2.1	Sistem Kepariwisataa.....	21
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	27
Gambar 3.1	Pembagian Ruang dalam Kuadran SWOT (IFAS/EFAS).....	36
Gambar 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	44
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015..... Menurut Golongan Usia	44
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk	45
Gambar 4.4	Peta Sebaran Wisata Kabupaten Blitar	47
Gambar 4.5	Fotomapping Pantai Tambakrejo	48
Gambar 4.6	Fotomapping Pantai Serang	49
Gambar 4.7	Fotomapping Pantai Jolosutro	50
Gambar 4.8	Time Series Plot Penerimaan Retribusi	58
	Pantai Tambakrejo	
Gambar 4.9	Time Series Plot Penerimaan Retribusi Pantai Serang.....	62
Gambar 4.10	Time Series Plot Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro..	66

OPTIMALISASI POTENSI RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN BLITAR

(Studi Kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro)

Oleh:

Eky Prista

135020100111033

Dosen:

Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui potensi retribusi pariwisata pantai terhadap pendapatan asli desa di Kabupaten Blitar dengan studi kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara Pemerintah Desa selaku pengelola tempat wisata dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai pendukung data primer. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Potensi Retribusi Daerah, Forecasting ARIMA Box-Jenkins dengan alat bantu uji yaitu *eviews*, dan Analisis SWOT Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa potensi retribusi pariwisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro belum tergali secara optimal dan berdasarkan analisis forecasting ARIMA Box-Jenkins diprediksi penerimaan retribusi pantai meningkat secara signifikan dengan asumsi tidak terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan dengan dilaksanakan MOU/perjanjian kerja sama tahun 2018 tentang pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro berdampak positif terhadap pendapatan asli desa.

Kata kunci: Retribusi Daerah, Retribusi Pariwisata, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Asli Daerah, MOU/Perjanjian Kerjasama Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata Pantai, Kabupaten Blitar.

**Optimization of the Tourism Retribution of Coastal Tourism on Village
Own-Source Revenue in Blitar Regency
(A Case Study of Tambakrejo Beach, Serang Beach, and Jolosutro Beach)**

By:

Eky Prista

135020100111033

Lecturer:

Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.

ABSTRACT

This study is a descriptive quantitative research conducted to determine the potential of coastal tourism retribution on village own-source revenue in Blitar Regency with a case study of Tambakrejo Beach, Serang Beach, and Jolosutro Beach. This study uses primary data from interviews with the village government as the manager of tourist attractions and secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Regional Revenue Agency of Blitar Regency as supporting primary data. The method used in this research is Potential Analysis of Regional Retribution, Forecasting ARIMA Box-Jenkins with test tools, namely eviews, and SWOT Analysis of Coastal Tourism Development Strategy. From the results of the analysis that has been carried out, it was found that the potential for tourism retribution for Tambakrejo Beach, Serang Beach, and Jolosutro Beach has not been explored optimally and based on the ARIMA Box-Jenkins forecasting analysis it is predicted that the acceptance of beach charges will increase significantly, assuming that it is not affected by the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the implementation of the MOU / cooperation agreement in 2018 concerning the management of Tambakrejo Beach, Serang Beach, and Jolosutro Beach tourism has a positive impact on the village's original income.

Keywords: Regional Retribution, Tourism Retribution, Village Own-Source Revenue, Locally-Generated Revenue, MOU / Cooperation Agreement in 2018 Regarding Coastal Tourism Management, Blitar Regency.

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

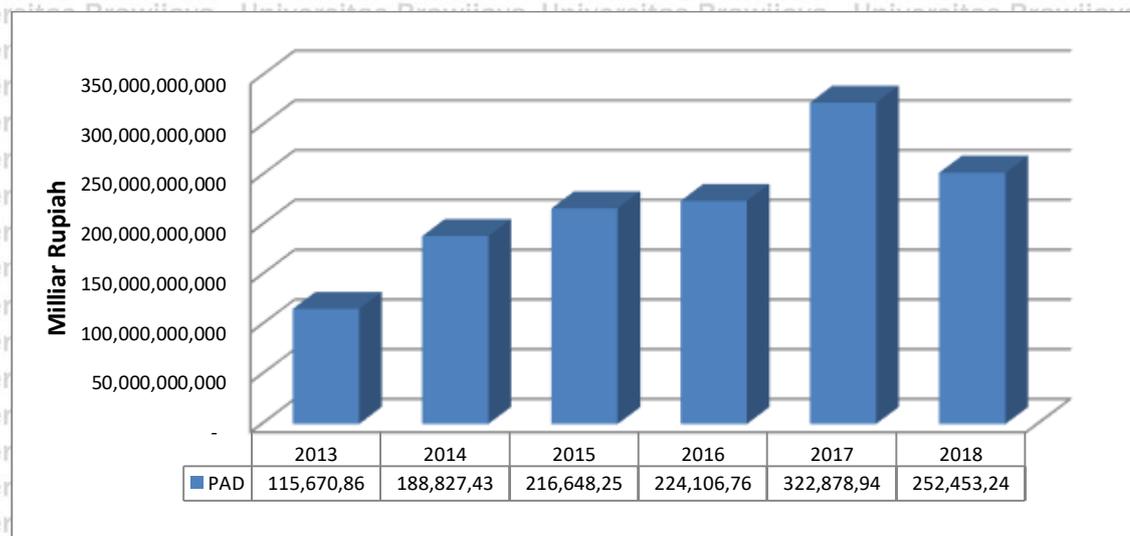
Pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan salah satu bagian dasar dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat mengembangkan daerah dan pemerataan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membuat UU (Undang-Undang) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi tersebut daerah memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pemerintahannya sebagai upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap daerah tentu akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan sebagai sumber pembiayaan dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. Upaya untuk optimalisasi sumber penerimaan daerah baik yang sudah baru maupun yang sudah ada, juga dilakukan oleh Kabupaten Blitar. Dimana Kabupaten ini memiliki potensi yang cukup beragam. Potensi yang dimiliki tidak hanya dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat dikelola oleh berbagai pihak.

Sementara itu, pada kenyataannya optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Hal ini diperkuat dengan data perolehan PAD yang belum sesuai harapan penerimaan PAD di Kabupaten Blitar.



Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar (milliar rupiah), 2013-2018



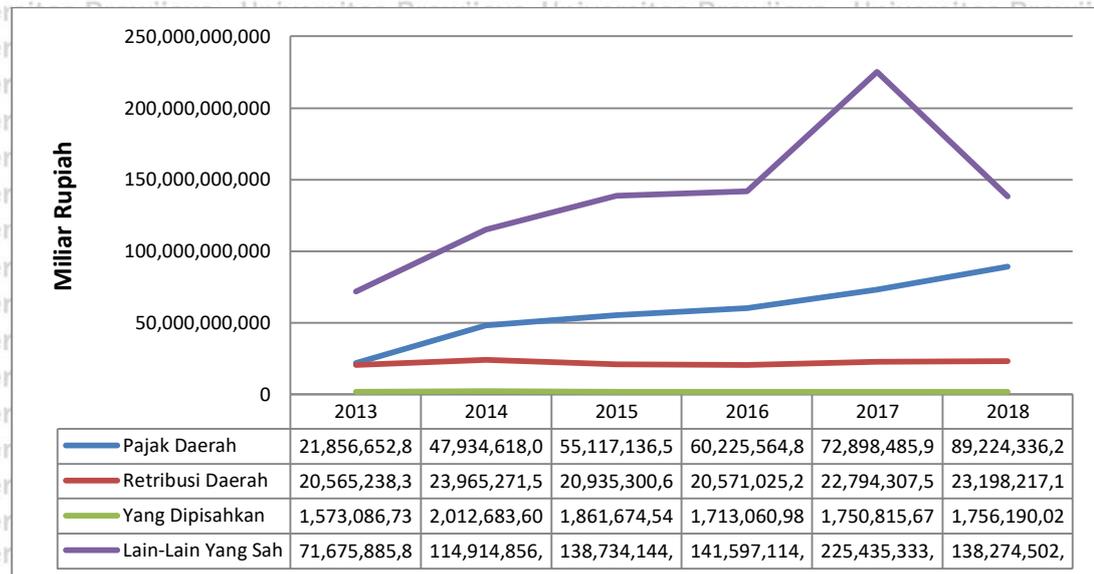
Sumber : DJPK 2019, diolah

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa PAD di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu enam tahun terakhir terus mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Blitar pada kisaran angka 115,671 (milliar rupiah), terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017, dengan peningkatan PAD mencapai 322,879 (milliar rupiah). Namun, pada tahun 2018 nilai PAD mengalami penurunan yang terbilang signifikan. Dengan besaran nilai PAD hanya 252,453 (milliar rupiah).

Sementara itu, sumber-sumber penerimaan PAD Kabupaten Blitar berasal dari berbagai komponen, misalnya saja pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun perkembangan realisasi penerimaan komponen PAD Kabupaten Blitar diuraikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Komponen PAD Kabupaten Blitar (miliar rupiah), 2013-2018



Sumber : DJPK 2019, diolah

Pada gambar 1.2 menunjukkan perkembangan realisasi penerimaan komponen PAD Kabupaten Blitar. Dimana masing-masing komponen memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Komponen PAD yang memiliki realisasi penerimaan terbesar adalah lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah, memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dan signifikan. Pada tahun 2013 terus mengalami trend positif. Namun, Pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang cukup tajam. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016-2017. Sedangkan komponen PAD yang memiliki realisasi penerimaan terkecil adalah hasil kekayaan yang dipisahkan dan retribusi daerah. Pada komponen retribusi perkembangan realisasi menunjukkan trend yang fluktuatif, namun tidak begitu signifikan dan cenderung stagnan/konstan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan kurang signifikannya perkembangan komponen PAD yaitu retribusi.

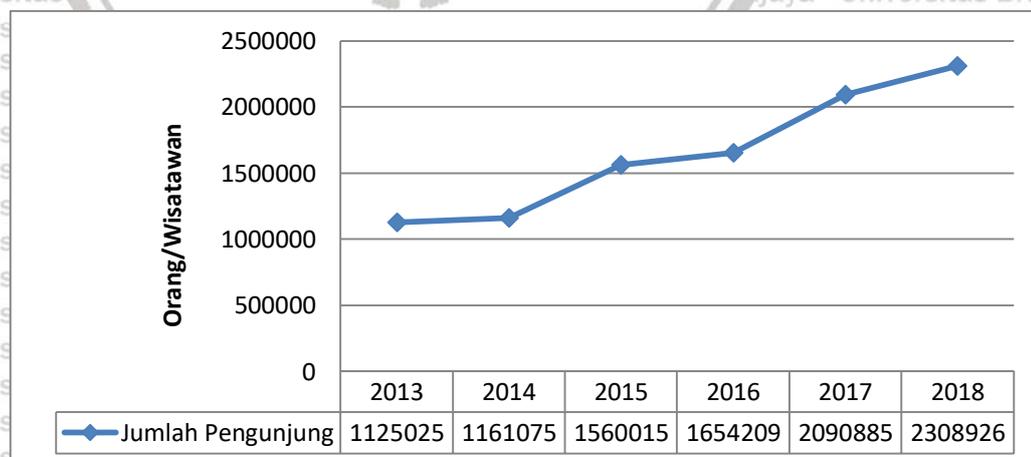
Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan pribadi maupun badan. Berkaitan dengan retribusi daerah, maka salah satu alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui retribusi pada sektor pariwisata. Sektor Pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Dilihat dari segi ekonomi, kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang salah satunya bisa bersumber dari retribusi. Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Blitar terus berkomitmen untuk meningkatkan sektor pariwisata demi pertumbuhan ekonomi melalui beragam upaya. Salah satunya dengan menggencarkan promosi potensi wisata dan melakukan inovasi pengelolaan destinasi wisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar mencatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Blitar dari tahun 2013-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut adalah gambar yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Blitar dari tahun 2013-2018.

Gambar 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2013-2018



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar

Dari Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Blitar sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 ini selalu mengalami peningkatan jumlah pengunjung disetiap tahunnya. Peningkatan jumlah pengunjung mencapai 436.676 orang atau 11% dari keseluruhan pengunjung pada tahun 2016-2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi wisata di Kabupaten Blitar telah menjadi sebuah destinasi yang diminati wisatawan dan telah diketahui banyak orang. Seharusnya dengan meningkatnya jumlah wisatawan, pendapatan dari sektor pariwisata dapat lebih ditingkatkan.

Pemda Kabupaten Blitar melalui Perda (Peraturan daerah) No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, menetapkan beberapa objek wisata yang disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah antara lain : Candi Penataran, Pemandian Penataran, Kebun Teh Sirah Kencong, Rambut Monte, Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro.

Hanya saja retribusi pariwisata tersebut seharusnya juga di imbangi dengan beberapa pembenahan, perbaikan dan perhatian khusus terutama pada ketersediaan infrastruktur. Jalan menuju beberapa objek wisata tersebut kondisinya rusak dan banyak lubang. Selain itu, fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di objek wisata juga masih belum memadai. Sementara untuk sistem pada pemungutan retribusi beberapa objek wisata belum terstruktur dengan baik. Untuk objek wisata Pantai Jolosutro dan Pantai Serang, seringkali ditemukan pos retribusi yang tidak ada petugasnya pada setiap hari kerja.

Dalam otonomi daerah pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota secara prinsip dalam rangka pembangunan diperluas kepada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu desa.

Pengakuan otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa sangat kental dalam

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah punya hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, maka dalam konteks pendanaan desa harus mampu menyusun program kerja dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDesa) yang secara garis besar terdiri dari belanja dan pendapatan desa. Dalam hal pengelolaan pendapatan, desa berhak mengelola dan menggali potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) desa-desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Tidak terkecuali di Desa Tambakrejo, Serang dan Ringinrejo yang menjadikannya dalam penelitian ini.

Pemda Kabupaten Blitar pada tahun 2018 baru saja melakukan MOU (Memorandum of Understanding)/Nota kesepahaman bersama dengan Perhutani KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Blitar dan Pemdes (Pemerintah Desa) (Desa Tambakrejo, Serang, dan Ringinrejo) dalam hal pengelolaan tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Saat ini sudah ada 3 objek wisata yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani, dan Pemdes diantaranya Pantai Tambakrejo di Desa Tambakrejo, Pantai Serang di Desa Serang dan Pantai Jolotutro di Desa Ringinrejo. Dalam pengelolaan ketiga pantai tersebut menggunakan sistem bagi hasil antara ketiga pihak tersebut dengan rincian 25% bagi Pemda Kabupaten Blitar yang bertugas untuk melakukan publikasi dan perbaikan fasilitas dan sarpras di lokasi wisata, kemudian 25% diberikan kepada Perhutani yang

repository.ub.ac.id

ugasnya sama dengan Pemda Kabupaten Blitar. Sementara itu 50% diberikan kepada Pemdes yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan dilokasi wisata. MOU tersebut dibuat atas dasar belum jelasnya persentase bagi hasil penerima retribusi antara Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar dan Pemdes setempat. Dengan adanya MOU ini diharapkan tidak ada lagi permasalahan terkait pengelolaan retribusi wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya seputar pengelolaan tempat wisata yang berujung kepada kesalahpahaman bagi hasil penerimaan retribusi antara Pemda, Perhutani dan Pemdes setempat. Namun, sumber-sumber retribusi yang ada pada objek wisata juga belum tergali dengan optimal. Belum maksimalnya optimalisasi penerimaan retribusi akan berdampak pada penerimaan PADes pada desa setempat. Maka, Pemdes sebagai pengelola berkewajiban melakukan upata optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan retribusi yang belum tergali pada objek wisata. Sehingga mampu meningkatkan penerimaan PADes guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan retribusi baru ini meliputi, retribusi parkir, retribusi hiburan dan retribusi toko/kios. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang

“OPTIMALISASI POTENSI RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN BLITAR (STUDI KASUS PANTAI TAMBAKREJO, PANTAI SERANG, DAN PANTAI JOLOSUTRO).



1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait optimalisasi potensi retribusi pariwisata pantai di Kabupaten Blitar, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara mengoptimalkan potensi retribusi pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)?
2. Bagaimana kebijakan dan strategi perencanaan dalam mendukung optimalisasi potensi retribusi pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian “Optimalisasi Potensi Retribusi Pariwisata Pantai Terhadap Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Blitar”:

1. Untuk menganalisis dan mengoptimalkan besarnya potensi retribusi pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kabupaten Blitar.
2. Untuk merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan dalam mendukung optimalisasi potensi retribusi pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang potensi retribusi disektor pariwisata dalam pendapatan asli desa.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan objek yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Blitar

Memberikan informasi tentang potensi retribusi sektor pariwisata dalam pendapatan asli desa maupun pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar.

Dengan begitu dapat dijadikan bahan pertimbangan dan membantu pimpinan dalam membuat kebijakan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi wisata dan retribusi sektor pariwisata agar lebih besar dalam memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli desa maupun pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman terutama dalam mengaplikasikan teori sebagai acuan analisis pada retribusi daerah terutama pengoptimalan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli desa maupun pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui besarnya retribusi sektor pariwisata dalam pendapatan asli desa maupun pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar sebagai bentuk transparansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Menurut UU (Undang-Undang) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip ekonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam UU (Undang-Undang). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata merupakan suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada

dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

2.2 Otonomi Desa

Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara Indonesia. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum

perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan sumber-sumber pendapatan desa dan daerah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Desa dan Daerah

Sumber Pendapatan Desa	Sumber Pendapatan Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. PADes terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. 4. Alokasi dana desayang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 5. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. 6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. 7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 8. Lain-Lain pendapatan desa yang sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan yang Sah 2. Pendapatan Transfer <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Perimbangan b. Dana Otonomi Khusus c. Dana Keistimewaan d. Dana Desa 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Dana Darurat c. Pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber : UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, diolah

2.3 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri dengan mengupayakan peningkatan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan sumber-sumber PAD yang sudah ada maupun dengan menggali sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2004). Pendapatan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah dan sebagai salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah (Widjaja, 2002). Sedangkan menurut Ahmad Yani (2002), PAD yakni pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Selanjutnya definisi PAD berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yakni sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya secara optimal, hal yang perlu dilakukan adalah mengenali sumber-sumber

pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua : *pertama*, sumber pendapatan yang ada pada saat ini ada dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan, *kedua*, sumber pendapatan dimasa datang yang masih potensial atau tersembunyi dan baru akan diperoleh apabila sudah dilakukan upaya-upaya tertentu (Mahmudi, 2002). Selain mengenali sumber-sumber pendapatan, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru yang dapat diperoleh melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan daerah dengan pihak swasta dan sebagainya.

2.5 Pendapatan Asli Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari PADes (Pendapatan Asli Desa), APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Sedangkan menurut HAW.Widjaja berpedoman pada (UU No. 32 Tahun 2004) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok : (a) Pendapatan Asli Desa; (b) Transfer; dan (c) Pendapatan lain-lain.

2.6 Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dari pengertian diatas memiliki kesimpulan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, artinya masyarakat yang menggunakan fasilitas atau jasa yang sengaja disediakan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat harus membayar retribusi sebagai akibat telah menggunakan difasilitas atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi daerah merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah (Ahmad Yani, 2002). Namun, tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokan menjadi tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut ;

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
- c) Retribusi pergantian biaya cetak
- d) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- e) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- f) Retribusi pelayanan pasar

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial (Ahmad Yani, 2002). Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial meliputi :

- a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi tempat pelelangan
- c) Retribusi terminal

- d) Retribusi tempat khusus parkir
- e) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- f) Retribusi pengelolaan limbah cair

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Ahmad Yani, 2002).

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek.

2.7 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Blitar No. 13 Tahun 2011 terdiri dari 9 jenis retribusi, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Berikut merupakan penjabaran terkait retribusi tempat rekreasi dan olahraga:

- Objek : Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Rincian objek wisata tersebut meliputi Kawasan Wisata Candi

Penataran dan Tempat Wisata; Kawasan Wisata Pantai

Tambakrejo, Serang, dan Jolosutro; Kawasan Wisata Olak-Alen;

Kawasan Wisata Gua Alam Umbul Tuk; dan Kawasan Wisata

Rambut Monte.

- Subjek : Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari pemerintah daerah.

- Tarif Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga

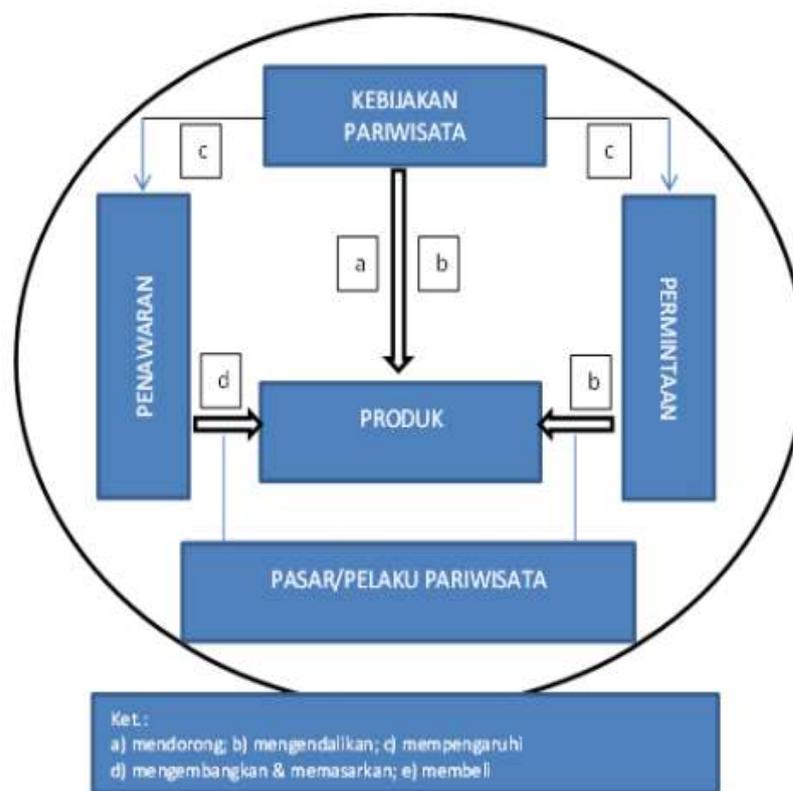
2.8 Ekonomi Pariwisata

Pariwisata merupakan invisible export karena negara tidak perlu menjual komoditi tersebut ke luar negeri untuk mendatangkan devisa, dengan sendirinya devisa akan masuk ke negara yang mempunyai objek wisata. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk mendorong industry pariwisatanya guna mendatangkan devisa. Selain itu pengembangan industry pariwisata juga bisa mendatangkan efek multiplier yang besar bagi perekonomian seperti berkembangnya industry jasa transportasi, perhotelan perdagangan, dan berkembangnya sektor-sektor lainnya (Yuana, 2010).

Dari sisi ekonomi ini, pariwisata muncul dari empat unsur pokok yang saling berkaitan dalam satu sistem, yaitu a) permintaan atau kebutuhan; b) penawaran atau pemenuhan kebutuhan berwisata itu sendiri; c) pasar dan kelembagaan yang berperan untuk memfasilitasi keduanya; d) pelaku atau actor yang menggerakkan tiga elemen tersebut.

Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Jika suatu daerah atau negara dapat mengelola dan mengembangkan sektor pariwisatanya dengan baik, maka akan berdampak pada perekonomian negara atau daerah dengan respon yang positif. Suatu daerah akan menghasilkan barang berupa penawaran objek wisata ataupun yang berkaitan dengan kepariwisataan jika dikelola dengan baik, maka akan mendorong para wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.

Gambar 2.1 Sistem Kepariwisata



Sumber : Damanik, 2006

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor pariwisata akan sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran akan wisata. Penawaran wisata yang tinggi akan mengembangkan produk-produk wisata, sehingga pariwisata akan dikenal. Permintaan yang tinggi dapat mengendalikan di segi ekonomi, yaitu jumlah uang yang beredar. Sehingga

permintaan yang tinggi akan produk wisata akan dapat juga dikendalikan oleh kebijakan pariwisata.

Sektor pariwisata dapat memegang peran penting dalam proses pembangunan ekonomi yang berimbang dan akan berdampak terhadap sektor yang lainnya. Pariwisata yang dikelola dengan baik akan menimbulkan manfaat dan juga dampak kepada pemerintah maupun masyarakat. Majunya industry pariwisata bergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah atau negara dan adanya pertumbuhan ekonomi yang berimbang kepada sektor lain seperti penginapan, restoran, serta tawaran dalam paket tour atau transportasi dan sarana prasarana. Hal itu tidak lepas juga dari dukungan pemerintah dan masyarakat.

Meningkatnya arus wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestic yang berkunjung tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi penduduk yakni mereka akan mendapatkan peluang atau kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka, secara otomatis dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Bagi pemerintah ini merupakan hal yang sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, dampak positif yang diperoleh melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Dampak yang ditimbulkan dalam ekonomi pariwisata ini nantinya akan mengurangi jumlah urbanisasi karena pariwisata ini terletak di desa dan tentunya akan ada pemerataan pembangunan daerah melalui kegiatan pariwisata.

2.9 Barang Publik

Barang publik (public goods) sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun seringkali tidak ada pihak swasta yang menyediakannya, karena mengutamakan prinsip tanpa mengejar motif meraih keuntungan (non-profitable). Walaupun ada pihak swasta yang menyediakan maka jumlahnya akan terbatas. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dihasilkan oleh pihak swasta kepada masyarakat. Penyediaan barang publik dalam jumlah yang terlalu besar akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan barang publik yang terlalu sedikit akan menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat.

A.C Pigou (Guritno, 2003) berpendapat bahwa penyediaan barang publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun pajak atau retribusi yang dikenakan atas barang publik tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Semakin banyak barang dan jasa yang disediakan pemerintah, maka tambahan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan semakin menurun.

Semakin banyak barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah, akan semakin besar yang dibutuhkan sehingga menyebabkan konsekuensi semakin besar pula pajak atau retribusi yang akan dipungut dari masyarakat. Keadaan ini menyebabkan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat. Secara teoritis, penyediaan barang publik akan optimal, apabila kepuasan yang diperoleh masyarakat sama dengan ketidakpuasan yang didapatkan masyarakat sebagai akibat dari pemungutan pajak ataupun retribusi.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini selain menggunakan buku-buku, artikel, dan jurnal penelitian sebagai literatur, juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan, adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut.

Muhammad Farid Ma'rif, Badrudin Kurniawan, Rizky Purna Aji Galih Pangestu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Desa Wisata : Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul)*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa kelompok masyarakat yang sadar wisata (Pokdarwis) bersama pemerintah desa dan masyarakat Desa Bejiharjo Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta, sejak tahun 2010 sudah merintis upaya menggali, mengelola potensi melalui pengembangan obyek wisata desa. Pada tahun 2011 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) telah mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) Bejiharjo. Nilai kontribusi dari sumber pengelolaan obyek wisata desa meningkat jumlahnya setiap tahun.

Ferry Pleanggra, Edy Yusuf A.G (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *analisis pengaruh obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita terhadap pendaptan retribusi objek pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap retribusi obyek wisata. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata yang terdapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi obyek wisata di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, semakin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke obyek wisata akan meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata yang terdapat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Cantika Bella, Imam Hanafi, dan Abdul Wachid (2013) dalam penelitiannya yang berjudul kontribusi retribusi pasar wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pedagang Pasar Minggu Kota Malang). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi yang dibayarkan pedagang apabila dilihat dari nominal Rupiah yang diterima Pemerintah Kota Malang dari Pasar Wisata Kota Malang adalah sebesar Rp. 22.032.000,00. Retribusi Pasar Wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 264.384.000,00 dapat dilihat bahwa besaran retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Malang dinilai wajar, para pedagang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Peningkatan kontribusi retribusi di Pasar Wisata Kota Malang sudah membatasi jumlah pedagang sehingga upaya untuk meningkatkan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sulit dilakukan.

Capriati, Christia (2015) dalam penelitiannya yang berjudul optimalisasi penerimaan retribusi jasa umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) efektivitas penerimaan tiap jenis pajak daerah selama tiga tahun selalu mencapai kategori sangat efektif. (2) Kontribusi yang diberikan setiap jenis retribusi jasa umum bervariasi. Rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi pelayanan kesehatan merupakan kontribusi yang paling besar yaitu sebesar 7,06% Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lanjut Mei Rezki Dwi Inggawati, Ngadiman, dan Muhtar (2013) dalam penelitiannya yang berjudul strategi optimalisasi retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (studi pada dinas pasar Kabupaten Sleman). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar

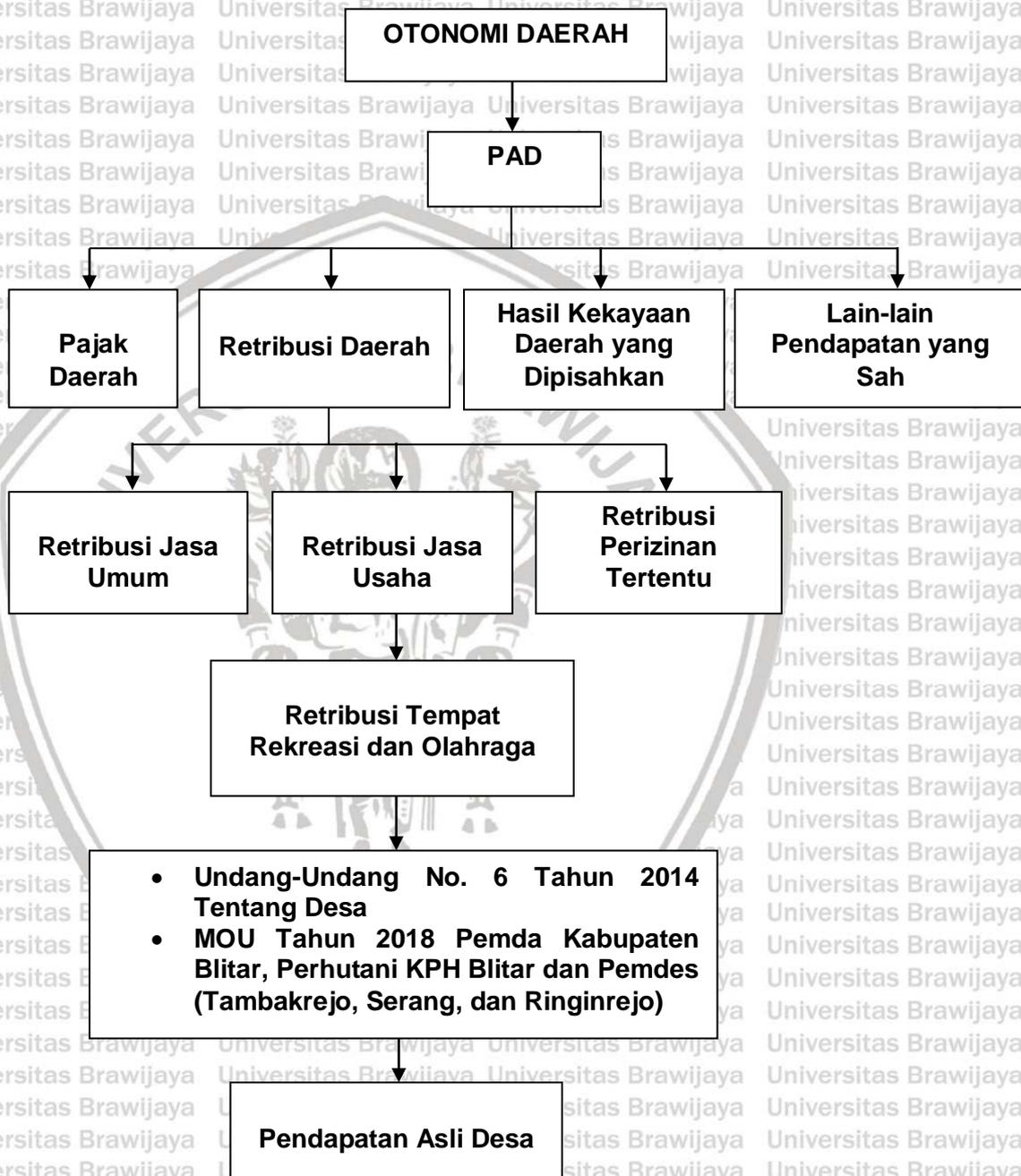
Kabupaten Sleman meliputi lima indikator yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik. Strategi yang dirasakan paling efektif adalah pemberlakuan BKPR yang dilakukan dalam proses meningkatkan pengawasan. Strategi dalam memperkuat proses pemungutan yaitu sosialisasi kepada pedagang dan bimbingan kepada juru pungut dirasa masih kurang efektif. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman, yaitu : 1.

Kurang SDM yang tersedia. (2) Rendahnya kesadaran pedagang. (3) Tingkat keramaian pasar. Retribusi pasar belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi, baik untuk retribusi daerah maupun pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut terlihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah masih sangat kurang yaitu <10%.

2.11 Kerangka Pikir

Pada bagian ini akan ditampilkan gambaran tentang kerangka konseptual penelitian.

Gambar 2.2 : Kerangka Pikir



Sumber : Berbagai Sumber Diolah

Kerangka pikir berfungsi untuk mengilustrasikan alur berfikir penulis dalam suatu penelitian berdasarkan teori-teori yang ada. Dalam kerangka yang disajikan pada gambar 2.1, dengan adanya otonomi daerah maka daerah memiliki keleluasaannya dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Setiap daerah akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan sebagai sumber pembiayaan dalam melaksanakan urusan pemerintahannya melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah).

PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Salah satu alternatif yang banyak dipilih dalam rangka meningkatkan PAD yaitu melalui pengoptimalan potensi sektor pariwisata. Keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata akan berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah melalui retribusi dari sektor pariwisata.

Selain itu, menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Desa juga memiliki wewenang untuk menggali potensi pendapatan yang ada didalam wilayahnya tetapi tetap berpedoman pada sistem perundangan-undangan yang berlaku.

Berpedoman pada UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar dan Pemdes (Desa Tambakrejo, Serang, dan Ringingrejo) melakukan MOU (Memorandum of Understanding)/ Nota kesepahaman dalam hal pengelolaan tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan diberikannya pengelolaan tempat wisata tersebut kepada Pemerintah Desa tentunya akan menambah PADes (Pendapatan Asli Desa) setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian.

Penelitian deskriptif menurut Ronny Kountur (2005) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejalas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Melalui metode penelitian deskriptif maka yang diperoleh deskripsi mengenai gambaran atau uraian secara jelas mengenai optimalisasi potensi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli desa.

Sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan objek yang didapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan retribusi tarif masuk lokasi wisata, retribusi parkir, dan retribusi unit usaha yang ada di dalam kawasan pantai di Kabupaten Blitar.

3.2 Definisi Operasional

1. Potensi penerimaan retribusi sektor pariwisata. Dengan indikatornya : total pendapatan jumlah potensi retribusi dari masing-masing tempat wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro.

2. Pendapatan Asli Desa. Dengan indikatornya : penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro terhadap Pendapatan Asli Desa setelah dilakukannya perjanjian antara ketiga pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Blitar, KPH Perhutani Blitar dan Pemerintah Desa setempat.
3. Kebijakan dan strategi perencanaan. Dengan indikatornya : Pemerintah Kabupaten Blitar selaku pembuat kebijakan, dalam meningkatkan penerimaan retribusi sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pendapatan asli desa.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tempat wisata yang ada di Kabupaten Blitar. Alasan memilih lokasi penelitian adalah penerimaan retribusi pariwisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro belum optimal dikarenakan banyak objek retribusi yang belum tergali dan belum jelasnya pembagian dari hasil retribusi daerah tersebut antara Pemerintah Kabupaten Blitar, KPH Perhutani Blitar dan Pemerintah Desa setempat.

3.4 Data dan Sumber Data

Semua data yang diperoleh melalui sumber dokumentasi merupakan informasi yang dapat dijadikan narasumber data, karena dianggap menguasai bidang permasalahan dan berhubungan erat dengan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang

atau responden yang sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil wawancara secara langsung dengan alat bantu kuesioner.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung. Data sekunder yang merupakan sumber data yang akan melengkapi sumber data primer, yaitu :

- a. Laporan Realisasi Pendapatan
- b. Dokumen

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara memberikan wawancara langsung kepada responden, dengan alat bantu kuisioner.

Responden dalam penelitian ini adalah Pengelola dari masing-masing tempat wisata di Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Potensi Retribusi Daerah

Perhitungan potensi Retribusi Kabupaten Blitar dilakukan atas dasar hasil pengumpulan atau inventarisasi objek yang terdapat di sektor pariwisata.

Selanjutnya perhitungan potensi dilakukan dengan mengalikan tarif retribusi terhadap basis retribusi bersangkutan. Tarif retribusi daerah yang digunakan merupakan tarif yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini tidak berdasarkan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar. Sementara itu, penentuan basis pajak dan retribusi daerah ditentukan melalui sebuah formulasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Potensi PAD} = \text{Basis Pajak \& Retribusi} \times \text{Tarif Pajak \& Retribusi}$$

Sumber : Mahmudi (2010:64)

3.6.2 Forecasting (Peramalan) ARIMA Box-Jenkins

Forecasting (Peramalan) adalah kegiatan memperkirakan apa yang terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan data yang relevan pada masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Oleh karena itu, setiap model peramalan pasti menghasilkan kesalahan. Jika tingkat kesalahan yang dihasilkan semakin kecil, maka hasil peramalan akan semakin mendekati tepat. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pembentukan forecasting ARIMA Box-jenkins.

1. Uji Stasioneritas
2. Uji Correlogram
3. Estimasi Model Terbaik
4. Forecasting (Peramalan)

Setelah semua tahap dilakukan dan diperoleh model, maka model ini selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan peramalan pendapatan retribusi periode selanjutnya.

3.6.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi fisik atau tata ruang, ekonomi dan social wilayah perencanaan serta kelembagaan sehingga dihasilkan potensi dan masalah yang terkait, yang dipergunakan untuk menentukan arah pengembangan tata ruang kota. Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan

kondisi kawasan yaitu untuk melihat strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman) serta menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut adalah (Yoeti 1996: 131-135):

1. Kekuatan (strength); kekuatan apa yang dikembangkan agar lebih tangguh sehingga dapat bertahan dipasaran, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri.
2. Kelemahan (weakness); segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu sendiri.
3. Peluang (opportunity); kesempatan yang berasal dari luar wilayah studi. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintahan, peraturan, atau kondisi ekonomi secara global.
4. Ancaman (threat); hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau objek.

a. Matriks SWOT

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi dasar pemecahan masalah. Adapun cara yang dilakukan:

1. **SO.** Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O)
2. **ST.** Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman (T) dan berusaha menjadikan maksimal menjadi peluang (O)
3. **WO.** Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O)

4. **WT.** Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman (T).

b. Kuadran SWOT

Keempat faktor yaitu kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) masing-masing dianalisis berdasarkan komponen dari tiap faktor untuk selanjutnya diberikan penilaian untuk mengetahui posisi objek penelitian pada kuadran SWOT. Sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk matriks kepada dua kelompok besar yaitu factor internal (IFAS/ Internal Factor Analysis Summary) yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal (EFAS/ External Factor Analysis Summary) yang terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Dari penilaian koordinat pada sumbu x dan y, sehingga diketahui posisinya sebagai berikut (Yoeti, 1996:143):

1. Kuadran I (Growth), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a. Ruang A dengan Rapid Growth Strategy, yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dalam waktu singkat.
 - b. Ruang B dengan Stable Growth Strategy, yaitu strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan kondisi.
2. Kuadran II (Stability), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a. Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy dimana pengelola objek melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif.

b. Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy dimana pengelolaan objek dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting.

3. Kuadran III (Survival), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:

a. Ruang E dengan Turn Around Strategy, yaitu strategi bertahan dengan cara tambal sulam untuk operasional objek.

b. Ruang F dengan Guirelle Strategy, yaitu strategi gerilya, sambil operasional dilakukan, diadakan pembangunan pemecahan masalah dan ancaman.

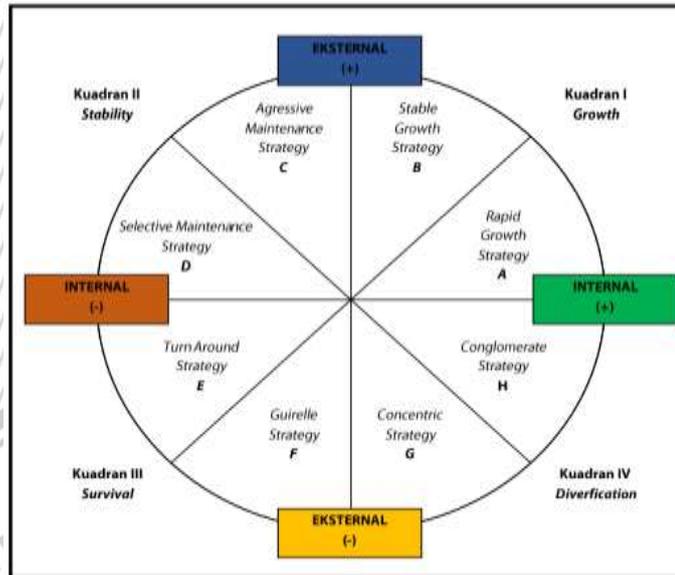
4. Kuadran IV (Disversification), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:

a. Ruang G dengan Concentric Strategy dimana strategi pengembangan objek dilakukan secara bersamaan dalam koordinasi satu pihak.

b. Ruang H dengan Conglomerate Strategy dimana strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor.

Pembagian ruang dalam analisis SWOT dengan penilaian terhadap faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Pembagian Ruang dalam Kuadran SWOT (IFAS/EFAS)



Sumber : Yoeti, (1996)

BAB IV**PEMBAHASAN****4.1 Gambaran Kabupaten Blitar**

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Luas Wilayah Kabupaten Blitar adalah sebesar 1.558,79 km². Kabupaten Blitar berada disebelah selatan Khatulistiwa, terletak pada 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹¹ Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Blitar merupakan dataran rendah, dengan rata-rata ketinggian ± 167 meter di atas permukaan air laut (DPL). Kecamatan dengan wilayah yang berada pada ketinggian tertinggi ialah Kecamatan Wates, dengan ketinggian ± 420 meter di atas permukaan air laut (DPL). Kabupaten Blitar mengelilingi Kota Blitar. Berikut merupakan batas wilayah Kabupaten Blitar secara geografis :

- Utara : Kabupaten Kediri
- Timur : Kabupaten Malang
- Selatan : Samudera Hindia
- Barat : Kabupaten Tulungagung

Secara administrasi, Kabupaten Blitar memiliki 22 Kecamatan yang terdiri dari 220 desa dan 28 kelurahan. Berikut merupakan pembagian administratif Kabupaten Blitar.

Tabel 4.1 Pembagian Adminitratif Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
1.	Bakung	11	111,24	7,00%
2.	Wonotirto	8	164,54	10,36%
3.	Panggungrejo	10	119,04	7,49%
4.	Wates	8	68,76	4,33%
5.	Binangun	12	76,79	4,83%
6.	Sutojayan	11	44,20	2,78%
7.	Kademangan	15	105,28	6,63%
8.	Kanigoro	12	55,55	3,50%
9.	Talun	14	49,78	3,13%
10.	Selopuro	8	39,29	2,47%
11.	Kesamben	10	56,96	3,59%
12.	Selorejo	10	52,23	3,29%
13.	Doko	10	70,95	4,47%
14.	Wlingi	9	66,36	4,18%
15.	Gandusari	14	88,23	5,55%
16.	Garum	9	54,56	3,43%
17.	Nglegok	11	92,56	5,83%
18.	Sanankulon	12	33,33	2,10%
19.	Ponggok	15	103,83	6,54%
20.	Srengat	16	53,98	3,40%
21.	Wonodadi	11	40,35	2,54%
22.	Udanawu	12	40,98	2,58%
Total			1.588,79	100,00%

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Kecamatan wonotirto merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar, yaitu sebesar 119,04 Km². Dengan presentase luas wilayah sebesar 10,36% dari luas total Kabupaten Blitar dan terdapat 8 Desa/Kelurahan. Sementara, kecamatan dengan luas wilayah terkecil ialah Kecamatan Sanankulon dengan luas wilayah sebesar 33,33 Km² atau sebesar 2,90% dari total luas wilayah Kabupaten Blitar dan terdapat 12 Desa/Kelurahan.

Kabupaten Blitar terletak pada ketinggian wilayah antara 123 mdpl – 420 mdpl dan memiliki kondisi alam yang sangat beragam, terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungaidan pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten blitar ialah sebagai berikut :

- a. Wilayah utara memiliki kemiringan lereng berkisar antara 2%-15%, 15%-40% dan lebih besar dari 40% dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Buthak.
- b. Wilayah tengah merupakan daerah yang relative datar dengan kemiringan 0%-20%. Namun, bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2%-15%.
- c. Wilayah selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perukitan dengan kemiringan 15%-40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada disekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0%-20%.

Potensi Kabupaten Blitar melimpah dan beragam. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031, Kabupaten Blitar masuk dalam beberapa rencana pengembangan kawasan, meliputi :

1. Pengembangan kawasan hortikultura (sentra penghasil pisang, rambutan dan belimbing);
2. Pengembangan kawasan perkebunan (tebu, kopi, kakao, kelapa, dan nilam);
3. Pengembangan kawasan sentra peternakan besar (ternak besar dan peternakan unggas);
4. Pengembangan kawasan perikanan, meliputi perikanan air tawar (budidaya ikan hias), dan perikanan air laut;
5. Selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

maka dokumen RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031 berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 bertujuan untuk

menciptakan Kabupaten Blitar sebagai kawasan agroindustri dan pariwisata.

Guna menunjang tujuan tersebut, dirumuskan kebijakan penataan ruang wilayah yang berkaitan dengan pengembangan wilayah yaitu :

- a. Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang.
- b. Pengembangan kawasan pedesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan pedesaan.
- c. Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan potensial.
- d. Pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pengembangan wilayah.
- e. Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan, dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu.
- f. Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
- g. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana.
- h. Pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.
- i. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri.
- j. Peningkatan kualitas kawasan permukiman pedesaandan perkotaan.

k. Pengembangan kawasan pesisir.

l. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah.

Dalam rencana pengembangan koridor wisata RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2013, wilayah Kabupaten Blitar juga termasuk dalam jalur pengembangan koridor C untuk konservasi kompleks Candi Penataran. Bersama dengan Monument Trisula, Candi Simping, dan Candi Penataran masuk dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Potensi alam yang bervariasi bisa dikembangkan menjadi objek wisata yang sangat berpotensi mengundang wisatawan domestic maupun luar negeri, seperti potensi pantai-pantai yang tersebar disepanjang pantai selatan, air terjun, pengembangan desa wisata ataupun paket-paket inovatif lain dari sektor pariwisata. Dalam rangka pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Blitar maka keberadaan infrastruktur pendukung wisata sangat diperlukan. Infrastruktur tersebut antara lain akses menuju lokasi wisata, sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, fasilitas kuliner, serta sarana penginapan/hotel yang memadai. Infrastruktur jalan menjadi pintu pembuka bagi usaha-usaha pengembangan wisata. Potensi wisata prioritas yang harus didukung oleh tersedianya jalan antara lain adalah potensi wisata di wilayah pesisir selatan, potensi wisata Sirah Kencong, potensi wisata perkebunan dan pegunungan.

Pemerintah sejak tahun 2002 telah merencanakan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). Terwujudnya JLS akan membuka konektivitas wilayah selatan Kabupaten Blitar hingga terhubung dengan wilayah Kabupaten Malang di bagian Timur dan Kabupaten Tulungagung di bagian Barat. Dampak pembangunan JLS terhadap pengembangan wilayah khususnya bagian selatan Kabupaten Blitar selain berkembangnya wisata pantai, direncanakan pula bagi

perkembangan kawasan industry baik industry berbasis potensi alam yaitu perikanan dan pertambangan, maupun kawasan industry berbasis teknologi/energy dan manufaktur. Potensi ketersediaan lahan diwilayah ini memungkinkan dibangun sebagai kawasan industry terpadu dengan fasilitas pelabuhan, jaringan jalan dan jaringan listrik.

4.2 Karakteristik Kependudukan Kabupaten Blitar

Berdasarkan data Tahun 2018 dari Kabupaten Blitar, jumlah penduduk di Kabupaten Blitar mencapai 1.157.500 jiwa, dengan komposisi penduduk terdiri dari 579.925 jiwa penduduk laki-laki dan 577.575 jiwa penduduk perempuan. Sex rasio Kabupaten Blitar ialah 100,40% yang berarti dalam 100 jiwa penduduk perempuan ada 100-101 jiwa penduduk laki-laki. Berikut merupakan rincian jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Blitar.



Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Blitar Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	%	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
			L	P	Total		
Bakung	111,24	7,00	12.504	13.033	25.537	95,94	230
Wonotirto	164,54	10,36	18.057	17.880	35.937	100,99	218
Panggungrejo	119,04	7,49	20.595	20.677	41.272	99,60	347
Wates	68,76	4,33	14.109	14.071	28.180	100,27	410
Binangun	76,79	4,83	21.756	21.720	43.476	100,17	566
Sutojayan	44,2	2,78	23.623	24.994	47.800	97,71	1081
Kademangan	105,28	6,63	32.710	32.734	65.444	99,93	622
Kanigoro	55,55	3,50	39.437	38.783	77.220	101,69	1390
Talun	49,78	3,13	30.282	30.513	60.795	99,24	1221
Selopuro	39,29	2,47	20.353	19.730	40.083	103,16	1020
Kesamben	56,96	3,59	24.374	24.994	49.358	97,48	867
Selorejo	52,23	3,29	17.493	17.909	35.402	97,68	678
Doko	70,95	4,47	19.141	19.176	38.317	99,82	540
Wlingi	66,36	4,18	25.601	25.433	51.034	100,66	769
Gandusari	88,23	5,55	34.142	33.536	67.678	101,81	767
Garum	54,56	3,43	33.153	32.571	65.724	101,79	1205
Nglegok	92,56	5,83	35.342	34.931	70.273	101,18	759
Sanankulon	33,33	2,10	28.342	28.314	56.656	100,10	1700
Ponggok	103,83	6,54	51.834	50.533	102.367	102,57	986
Srengat	53,98	3,40	32.834	33.049	65.883	99,35	1221
Wonodadi	40,35	2,54	23.453	23.516	46.969	99,73	1164
Udanawu	40,98	2,58	20.800	20.295	41.095	102,49	1003
Kab. Blitar	1.588,79	100	579.925	577.575	1.153.803	100,41	726

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018

berdasarkan jenis kelamin di setiap kecamatan. Jumlah penduduk paling banyak

berada pada Kecamatan Ponggok, yaitu sebesar 101.792 jiwa. Namun, untuk

kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Sanankulon, yaitu sebesar 1688

jiwa/km². Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Kabupaten

Blitar cenderung seimbang, dengan sex ratio sebesar 100,41%

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan

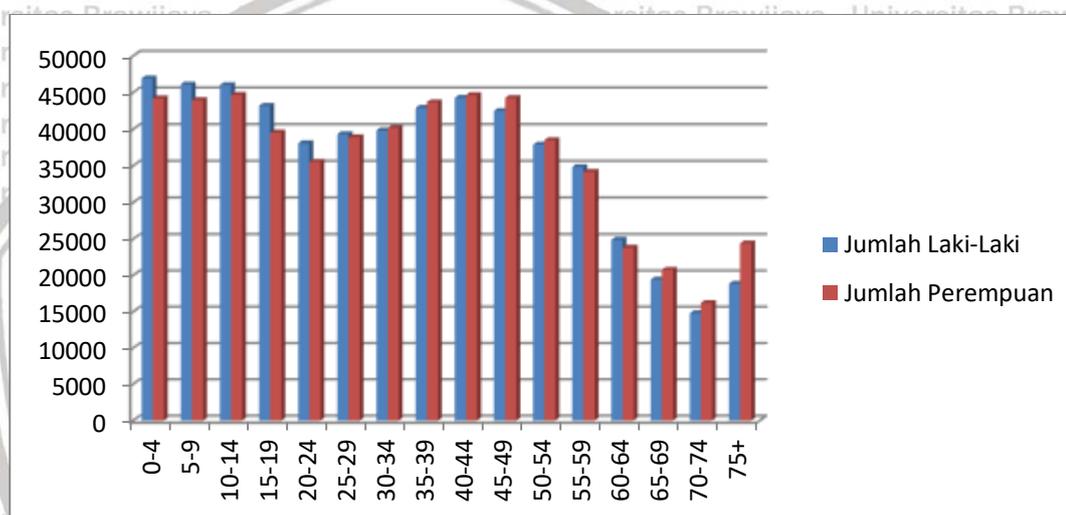
berpengaruh pada nilai sex ratio. Nilai sex ratio Kabupaten Blitar dari tahun ke

tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017, sex ratio

Kabupaten Blitar sebesar 100,41. Artinya, dalam 10.000 jiwa penduduk

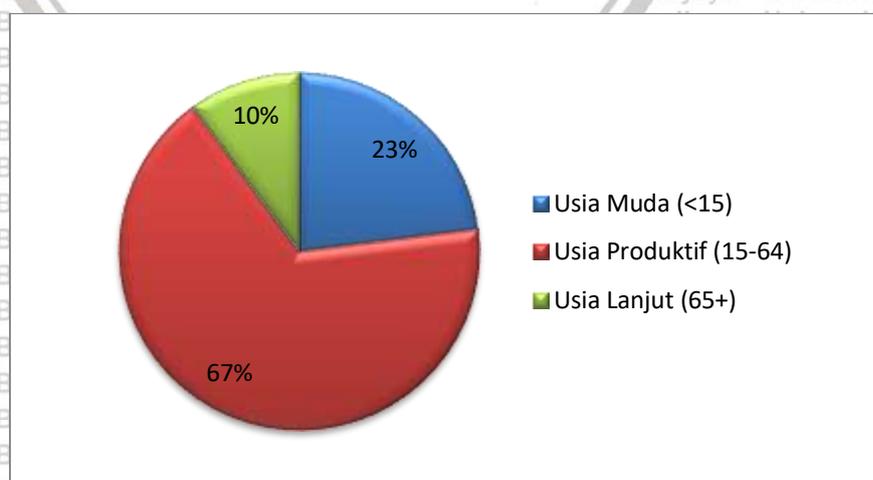
perempuan terdapat 10.041 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex ratio digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan berwawasan kesetaraan gender maupun sebagai informasi untuk kepentingan mengakomodir tingkat keterwakilan perempuan dalam menjaga legislatif. Sementara itu, untuk mengetahui penduduk menurut kelompok usia, dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk tersebut mampu menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur sekaligus menurut jenis kelamin.

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, diolah

Gambar 4.2 Presentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015 Menurut Golongan Usia

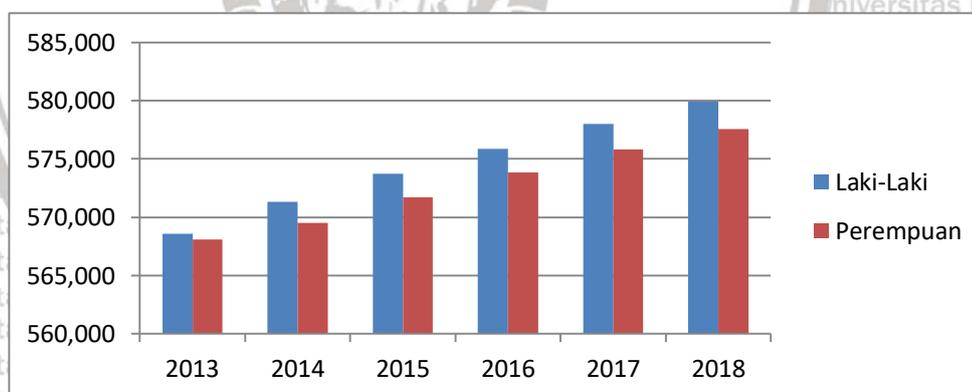


Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, diolah

Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Blitar berada pada rentang usia produktif (15-64 tahun) dengan presentase sebesar 67%. Sisanya merupakan usia non produktif yang terdiri dari penduduk usia muda di bawah 15 tahun sebesar 23% dan penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas sebesar 10%. Melalui informasi diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki potensi besar dalam hal penyediaan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan besarnya presentase usia produktif. Hal tersebut perlu diimbangi dengan tingginya kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dipasar tenaga kerja.

Berdasarkan data perkembangan penduduk yang ada di Kabupaten Blitar, jumlah penduduk Kabupaten Blitar terus meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2013-2018.

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, diolah

Gambar 4.3 menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Blitar. Jumlah Penduduk di Kabupaten Blitar terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Penambahan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan yang seimbang.

4.3 Karakteristik Potensi Daerah

Berdasarkan Data dari BPS (Kabupaten Blitar dalam Angka 2019), terdapat berbagai macam potensi daerah yang ada di Kabupaten Blitar. Berikut merupakan potensi daerah yang ada di Kabupaten Blitar.

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Pariwisata
4. Kelautan dan Perikanan
5. Perdagangan
6. Perindustrian

Dari berbagai macam potensi daerah tersebut sektor yang sangat menjanjikan adalah sektor pariwisata. Kabupaten Blitar memiliki berbagai macam potensi pariwisata yang didukung dengan potensi keindahan alamnya. Hal ini dapat dilihat melalui tersebarnya berbagai obyek pariwisata yang tersebar hampir deiseluruh wilayah Kabupaten Blitar. Berdasarkan data dari BPS (Kabupaten Blitar dalam Angka 2019) terdapat berbagai jenis obyek pariwisata di Kabupaten Blitar, diantaranya berupa tempat peninggalan sejarah, wisata alam, pantai, bendungan, pemandian, taman bermain, dan masih banyak lagi, namun obyek wisata disekitar wilayah Kabupaten Blitar belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Berikut merupakan peta sebaran pariwisata Kabupaten Blitar.

kegiatan pemerintahan. PAD dan PADes merupakan salah satu sumber pendapatan daerah maupun desa selain dana transfer dan pendapatan lainnya.

4.4 Gambaran Umum Pariwisata

4.4.1 Pantai Tambakrejo

Secara geografis Pantai Tambakrejo terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Desa Tambakrejo memiliki luas wilayah 4,89 Km² untuk presentase luas wilayah terhadap kecamatan Wonotirto mencapai 2,97%. Jumlah penduduk di Desa Tambakrejo mencapai 5.108 orang dengan kepadatan penduduk 1.045 jiwa/Km². Objek Wisata Pantai Tambakrejo merupakan objek wisata komersil yang digunakan untuk larung sesaji di bulan Muharram. Kawasan bibir pantai terdapat kampung nelayan sehingga terdapat tempat pelelangan ikan dan pasar ikan. Kegiatan ekonomi yang ada di Pantai Tambakrejo berupa jual beli pakaian, ikan bakar, ikan segar, dan berbagai macam minuman. Berikut merupakan fotomapping pantai Tambakrejo.

Gambar 4.5 Fotomapping Pantai Tambakrejo



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

4.4.2 Pantai Serang

Pantai Serang merupakan sebuah pantai yang terletak di Desa Serang Kecamatan Pangungrejo. Secara geografis Desa Serang terletak di Kabupaten Blitar bagian Selatan diwilayah pesisir Samudra Indonesia. Jarak tempuh Desa ke Ibukota Kabupaten adalah 45 Km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam. Luas wilayah Desa Serang mencapai 744.5 Ha, yang terbagi menjadi 3 dusun : Dusun Serang I, Dusun Serang II (Kedungkrombang, Grontol, Puthukrejo), Dusun Serang III (Klatak, Grobokan, Kedungbiru).

Sementara itu, Desa Serang terdapat objek wisata Pantai Serang yang terdiri atas 3 kompleks pantai yang biasanya digunakan sebagai tempat larung sesaji setiap tanggal 1 Muharram. Sekitar 50 meter dari Pantai Serang terdapat perkampungan nelayan penghasil komoditas laut berupa lobster. Berikut merupakan fotomapping Pantai Serang.

Gambar 4.6 Fotomapping Pantai Serang

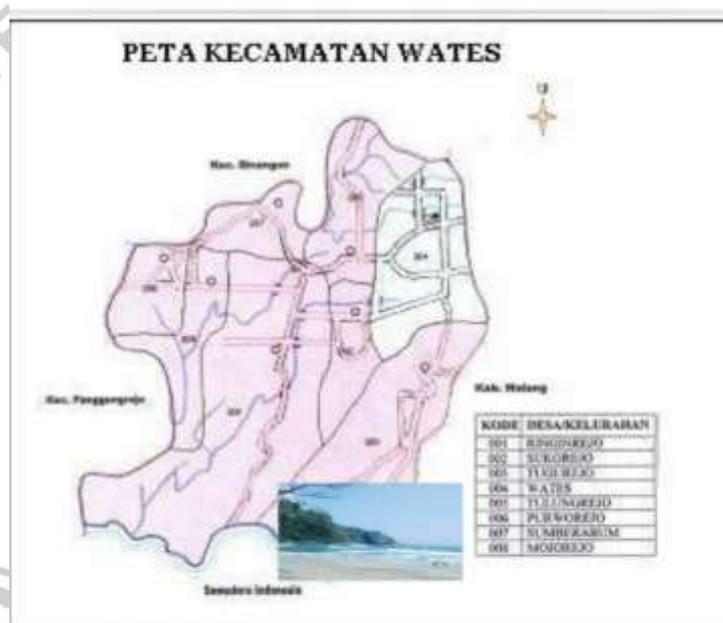


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

4.4.3 Pantai Jolosutro

Secara geografis Pantai Jolosutro terletak di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Pantai Jolosutro terletak di Kabupaten Blitar bagian Tenggara di wilayah pesisir Samudra Indonesia. Jarak tempuh Desa ke Ibukota Kabupaten adalah 50 Km. Kawasan wisata Pantai Jolosutro berada disebuah teluk kecil di antara perbukitan dengan garis pantai panjang dan berpasir hitam. Sementara itu, Pantai Jolosutro merupakan kawasan wisata religi yang setiap tahun diadakan ritual Melasti menjelang Hari Raya Nyepi. Berikut merupakan fotomapping dari Pantai Jolosutro.

Gambar 4.7 Fotomapping Pantai Jolosutro



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

4.5 Hasil dan Pembahasan

4.5.1 Analisis Potensi Retribusi Pariwisata

Retribusi tempat pariwisata diperoleh dengan perhitungan asumsi jumlah rekapitulasi karcis dengan 3 tempat wisata berdasarkan MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro yang dikelola oleh pemerintah desa dan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018. Dalam pengelolaan ketiga pantai tersebut menggunakan sistem bagi hasil antara Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar, dan Pemerintah Desa setempat. Pada dasarnya perhitungan potensi retribusi tempat wisata adalah dengan mengalikan jumlah kunjungan wisatawan dan tarif karcis yang dikenakan pada masing-masing tempat wisata. Perhitungan potensi retribusi tempat wisata pantai di Kabupaten Blitar dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. Berikut merupakan tarif masing-masing obyek wisata pantai serta rincian potensi Retribusi Tempat Wisata Pantai di Kabupaten Blitar.

Tabel 4.3 Potensi Retribusi Tempat Wisata Pantai Kabupaten Blitar

Objek Wisata	Jumlah Kunjungan (2019)	Tarif Masuk Kawasan Wisata		Keterangan
		Sebelum MOU 2018	Sesudah MOU 2018	
Pantai Tambakrejo	189.010	Rp 5.000	Rp 7.000	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat potensi parkir sebanyak 34 titik parkir yang masih dikelola oleh warga dengan tarif Rp.5.000,- untuk roda 2 dan Rp. 10.000,- untuk roda 4/lebih. • Terdapat potensi toko/kios sebanyak 184 toko/kios dalam kawasan wisata yang belum terkena retribusi. • Di dalam kawasan wisata juga terdapat pasar ikan sebanyak 20 lapak yang dikenakan retribusi sebesar Rp.5.000,- per hari
Pantai Serang	52.779	Rp 5.000	Rp 7.000	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Potensi kios/ toko sebanyak 120 kios/toko didalam kawasan wisata yang belum terkena retribusi. • Terdapat sebanyak 40 titik parkir yang masih dikelola oleh karangtaruna Desa Serang dengan tarif Rp.5.000,- untuk roda 2 dan Rp.10.000,- unruk roda 4. • Terdapat atraksi wisata yakni sewa ATV yang dikelola oleh POKJA Desa Serang sebanyak 35 unit ATV. Harga sewa @ 30 menit Rp.50.000,-
Pantai Jolosutro	20.620	Rp 5.000	Rp 7.000	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat potensi toko/kios yang belum terkena retribusi. • Terdapat penarikan parkir dirumah warga yang belum terkelola.

Sumber : Hasil Survei Primer, 2020

Berdasarkan hasil survei potensi retribusi tempat wisata pantai di Kabupaten Blitar diketahui potensi retribusi yang belum tergalai dengan optimal.

Potensi tersebut akan semakin besar apabila dikenakan tarif retribusi parkir dan retribusi toko/kios. Sehingga penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro akan semakin meningkat.

Pada Tahun 2018 pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro melibatkan beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar, dan Pemerintah Desa setempat. Dalam pengelolaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar bertugas untuk melakukan publikasi dan perbaikan sarana prasarana di lokasi wisata. Sedangkan Pemerintah Desa bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan tempat wisata. Berdasarkan hal tersebut terdapat mekanisme bagi hasil retribusi dalam penerimaan retribusi wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro. Berikut merupakan proporsi bagi hasil retribusi sebagai berikut.

Tabel 4.4 Bagi Hasil Retribusi Sebelum dan Sesudah MOU Tahun 2018

Sebelum MOU Tahun 2018		Sesudah MOU Tahun 2018	
BAPENDA	15%	BAPENDA	15%
Asuransi	5%	Asuransi	5%
1. Pemda Kab. Blitar (45%)	80%	1. Pemda Kab. Blitar (25%)	80%
2. Perhutani KPH Blitar (45%)		2. Perhutani KPH Blitar (25%)	
3. Bagi Hasil ke Desa (10%)		3. Pemerintah Desa (50%)	

Sumber : BAPENDA Kabupaten Blitar diolah, 2020

Pada tabel 4.4 menunjukkan bagi hasil penerimaan retribusi sebelum dan sesudah dilaksanakan MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pantai.

Berdasarkan pelaksanaan pengelolaan retribusi pantai sebelum MOU Tahun 2018, Pemda Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar memperoleh bagi hasil retribusi mencapai 45% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Sedangkan, pemerintah desa hanya menerima bagi hasil 10% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Sementara itu, dilaksanakan MUO Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pantai berdampak positif bagi pemerintah desa. Pemerintah desa memperoleh

bagi hasil penerimaan retribusi mencapai 50% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Sedangkan, Pemda Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar memperoleh 25% setelah dikenakan pajak dan asuransi. Hal ini tidak lepas dari perubahan harga tiket masuk menjadi Rp.7.000,-. Lebih lanjut, MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pantai yang dikelola oleh Pemdes bersifat sementara/kontrak dalam tempo 1 tahun. Apabila dalam pengelolaannya berhasil maka akan diperpanjang kembali izin pengelolaan pantai oleh Pemda Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar selaku pemilik aset dari kawasan wisata pantai.

Berdasarkan bagi hasil penerimaan retribusi diatas maka dijelaskan mengenai perhitungan penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro.

1. Pantai Tambakrejo

Tabel 4.5 Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata Pantai Tambakrejo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Retribusi	Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo				
			BAPENDA	Asuransi	Pemda Kab. Blitar	Perhutani KPH Blitar	Pemdes Tambakrejo
2015	79,344	396,720,000	59,508,000	19,836,000	142,819,200	142,819,200	31,737,600
2016	131,502	657,510,000	98,626,500	32,875,500	236,703,600	236,703,600	52,600,800
2017	116,256	581,280,000	87,192,000	29,064,000	209,260,800	209,260,800	46,502,400
2018	161,028	995,470,000	149,320,500	49,773,500	251,734,000	251,734,000	292,908,000
2019	189,010	1,323,070,000	198,460,500	66,153,500	264,614,000	264,614,000	529,228,000

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa hasil penerimaan retribusi tiket masuk kawasan wisata Pantai Tambakrejo pada tahun 2015-2019. Dimana penerimaan retribusi Pantai Tambakejo memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dan signifikan. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo pada kisaran angka Rp. 396.720.000,- terus meningkat pada tahun-

tahun berikutnya. Namun pada tahun 2017 penerimaan retribusi wisata mengalami penurunan yang terbilang signifikan. Dengan besaran nilai penerimaan retribusi hanya Rp.581.280.000,- seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan yang menurun. Sedangkan Penerimaan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.1.323.070.000,-.

Sementara itu dalam pelaksanaan MOU Tahun 2018 tentang pengelolaan wisata pantai Pemerintah Desa Tambakrejo lebih diuntungkan. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat yang cukup signifikan.

Pada tahun 2018 bagi hasil retribusi pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo mencapai Rp.292.908.000,- atau 50% dari penerimaan retribusi. Bagi hasil retribusi tahun 2018 terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun 2017 atau sebelum dilaksanakan MOU tentang pengelolaan pantai dikisaran angka Rp.46.502.400,- atau 10 % dari penerimaan retribusi. Penerimaan tertinggi bagi hasil retribusi Pemerintah Desa Tambakrejo terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.529.228.000,-.

2. Pantai Serang

Tabel 4.6 Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata Pantai Serang Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Retribusi	Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pantai Serang				
			BAPENDA	Asuransi	Pemda Kab. Blitar	Perhutani KPH Blitar	Pemdes Serang
2015	19,660	98,300,000	14,745,000	4,915,000	35,388,000	35,388,000	7,864,000
2016	22,370	111,850,000	16,777,500	5,592,500	40,266,000	40,266,000	8,948,000
2017	17,733	88,665,000	13,299,750	4,433,250	31,919,400	31,919,400	7,093,200
2018	59,179	386,453,000	57,967,950	19,322,650	82,898,520	82,898,520	143,365,360
2019	52,779	369,453,000	55,417,950	18,472,650	67,188,520	67,188,520	161,185,360

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil penerimaan retribusi tiket masuk kawasan wisata Pantai Serang pada tahun 2015-2019. Dimana dalam kurun waktu 5 tahun hasil penerimaan retribusi memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dan signifikan. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi Pantai Serang pada kisaran angka Rp.98.300.000,- dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang terbilang signifikan. Dengan besaran penerimaan retribusi hanya Rp.88.665.000,-. Kemudian, penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan pendapatan retribusi mencapai Rp.386.453.000,-. Sementara itu, pada tahun 2019 penerimaan retribusi kembali mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa dalam pelaksanaan MOU Tahun 2018 tentang pengelolaan wisata pantai Pemerintah Desa Serang lebih diuntungkan. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 bagi hasil retribusi pengelolaan wisata Pantai Serang mencapai Rp.143.365.360,- atau 50% dari penerimaan retribusi. Bagi hasil retribusi tahun 2018 terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun 2017 atau sebelum dilaksanakan MOU tentang pengelolaan pantai dikisaran angka Rp. 7.093.200,- atau 10 % dari penerimaan retribusi. Penerimaan tertinggi bagi hasil retribusi Pemerintah Desa Serang terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.161.185.360,-.

Dalam MOU Tahun 2018 proporsi bagi hasil retribusi Pantai Serang untuk bulan September dan Desember berbeda dari bulan lainnya. Pemerintah Desa Serang pada bulan September dan Desember memperoleh proporsi bagi hasil penerimaan retribusi mencapai 70% setelah dikenakan pajak dan asuransi.

Sedangkan, Pemda Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar memperoleh

proporsi bagi hasil penerimaan retribusi sebesar 15%. Hal ini dikarenakan terdapat acara hiburan Serang Culture Festival dan Tahun Baru.

3. Pantai Jolosutro

Tabel 4.7 Hasil Penerimaan Retribusi Tiket Masuk Kawasan Wisata Pantai Jolosutro Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Retribusi	Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro				
			BAPENDA	Asuransi	Pemda Kab. Blitar	Perhutani KPH Blitar	Pemdes Ringinrejo
2015	5,603	28,015,000	4,202,250	1,400,750	10,085,400	10,085,400	2,241,200
2016	18,117	90,585,000	13,587,750	4,529,250	32,610,600	32,610,600	7,246,800
2017	8,564	42,820,000	6,423,000	2,141,000	15,415,200	15,415,200	3,425,600
2018	19,794	110,404,000	16,560,600	5,520,200	24,270,400	24,270,400	39,782,400
2019	20,620	144,340,000	21,651,000	7,217,000	28,868,000	28,868,000	57,736,000

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa hasil penerimaan retribusi tiket masuk kawasan wisata Pantai Jolosutro pada tahun 2015-2019. Dimana penerimaan retribusi Pantai Jolosutro memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dan signifikan. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo pada kisaran angka Rp. 28.015.000,- terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Namun pada tahun 2017 penerimaan retribusi wisata mengalami penurunan yang terbilang signifikan. Dengan besaran nilai penerimaan retribusi hanya Rp.42.820.000,- seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan yang menurun. Sedangkan Penerimaan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.144.340.000,-.

Sementara itu dalam pelaksanaan MOU Tahun 2018 tentang pengelolaan wisata pantai Pemerintah Desa Ringinrejo lebih diuntungkan. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 bagi hasil retribusi pengelolaan wisata Pantai Jolosutro mencapai

Rp.39.782.400,- atau 50% dari penerimaan retribusi. Bagi hasil retribusi tahun 2018 terbilang cukup tinggi dibandingkan tahun 2017 atau sebelum dilaksanakan MOU tentang pengelolaan pantai dikisaran angka Rp.3.425.600,- atau 10 % dari penerimaan retribusi. Penerimaan tertinggi bagi hasil retribusi Pemerintah Desa Ringinrejo terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp.57.736.000,-.

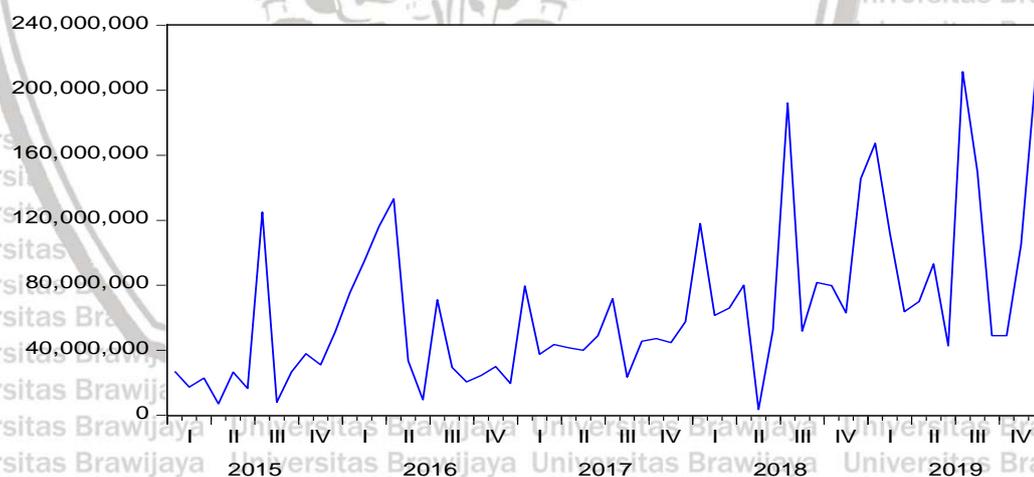
4.5.2 Forecasting (Peramalan) ARIMA Box-Jenkins

4.5.2.1 Permodelan dan Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo

1. Time series Plot Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo

Time series plot digunakan untuk melihat pola yang terbentuk dari data penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2019. Berikut merupakan hasil time series plot dari data penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo di Kabupaten Blitar.

Gambar 4.8 Time Series Plot Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo
PANTAL_TAMBAKREJO



Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 4.8 diketahui bahwa penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo mengalami fluktuatif, meskipun pada bulan tertentu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah kunjungan bukan pada waktu-waktu tertentu seperti libur hari raya, liburan sekolah, maupun liburan akhir tahun.

2. Identifikasi Model Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo

Identifikasi model ARIMA digunakan untuk melihat pola kestasioneran data, baik stasioner dalam varians maupun mean. Hipotesis yang digunakan pada uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) adalah :

H_0 : data tersebut tidak stasioner

H_1 : data tersebut stasioner

Metode pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria, dimana jika ADF test statistic > Test Critical Value (critical value=5%) maka H_0 ditolak, dan jika ADF test statistic < Test Critical Value (critical value=5%) maka H_0 diterima. Berikut

Tabel 4.8 yang menunjukkan hasil uji stasioneritas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) Pantai Tambakrejo

Null Hypothesis: D(PANTAI_TAMBKREJO) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.971707	0.0000
Test critical values:		
1% level	-2.608490	
5% level	-1.946996	
10% level	-1.612934	

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil pengujian didapatkan nilai test statistic dari ADF sebesar 6.971707 Nilai test statistic yang lebih besar dari test critical value 5% menunjukkan bahwa H_0 ditolak. Hipotesis yang diterima adalah H_1 yang menunjukkan data stasioner pada tingkat differencing.

Stasioner dalam mean dapat dilihat dari dari ACF, apabila pola turun cepat menuju nol, maka dapat dikatakan data sudah stasioner dalam mean. Jika belum stasioner dalam mean dapat diatasi dengan differencing. Berikut merupakan ACF dan PACF pada tingkat differencing.

Tabel 4.9 ACF dan PACF Pantai Tambakrejo Tingkat Differencing

	ACF	PACF	Q-Stat	Probability
1	-0.300	-0.300	5.5669	0.018
2	-0.221	-0.341	8.6507	0.013
3	0.087	-0.130	9.1321	0.028
4	-0.155	-0.307	10.714	0.030
5	-0.023	-0.287	10.750	0.057
6	0.280	0.040	16.073	0.013
7	-0.011	0.094	16.081	0.024
8	-0.174	-0.043	18.217	0.020
9	0.045	-0.005	18.365	0.031
10	0.001	0.044	18.365	0.049

Sumber : Data diolah, 2020

PACF yang sudah dilakukan differencing terlihat menurun secara cepat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa data penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo sudah stasioner dalam mean. Maka dugaan model sementara yang diperoleh adalah (1,1,2), (2,2,2) dan (2,1,1).

3. Estimasi Model ARIMA.

Estimasi model dugaan ARIMA yang diperoleh dari ACF dan PACF, pengujian parameter ARIMA yang dinyatakan dengan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : p value > 0,05 (parameter pada model ARIMA tidak signifikan)

H_1 : p value < 0,05 (parameter model ARIMA signifikan)

Pendugaan dan pengujian parameter model ARIMA data penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo disajikan dalam Tabel 4.10

Tabel 4.10 Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter Model ARIMA Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo

Model	Parameter	P-value	Akaike Info Criterion (AIC)
ARIMA (1,1,2)	AR 1	0.0000	38.18945
	MA 1	0.0000	
ARIMA (2,1,1)	AR 2	0.1843	38.15338
	MA 1	0.0000	
ARIMA (2,2,2)	AR 2	0.9395	38.56744
	MA 2	0.5782	

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.10 yang diperoleh pada Lampiran 4 dapat diketahui bahwa model yang signifikan yaitu ARIMA (1,1,2) hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value < 0,05 dan AIC paling kecil dan signifikan. Sehingga diperoleh keputusan H_0 ditolak yang berarti parameter signifikan. Langkah selanjutnya adalah pada tahap peramalan.

4. Forecasting Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo

Berikut merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo dengan menggunakan model ARIMA (1,1,2).

Tabel 4.11 Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Tambakrejo

Periode	Forecast Tahun 2020	Forecast tahun 2021
Januari	112,181,422.54	130,346,119.72
Februari	113,695,350.71	131,859,875.45
Maret	115,208,884.53	133,373,558.96
April	116,722,760.68	134,887,305.16
Mei	118,236,339.66	136,400,996.95
Juni	119,750,176.61	137,914,735.97
Juli	121,263,789.62	139,428,433.99
Agustus	122,777,597.03	140,942,167.60
September	124,291,235.68	142,455,870.32
Oktober	125,805,020.83	143,969,599.85
November	127,318,678.81	145,483,306.10
Desember	128,832,447.18	146,997,032.57
Total	1,446,083,704.88	1,664,059,002.65

Sumber : Data diolah, 2020

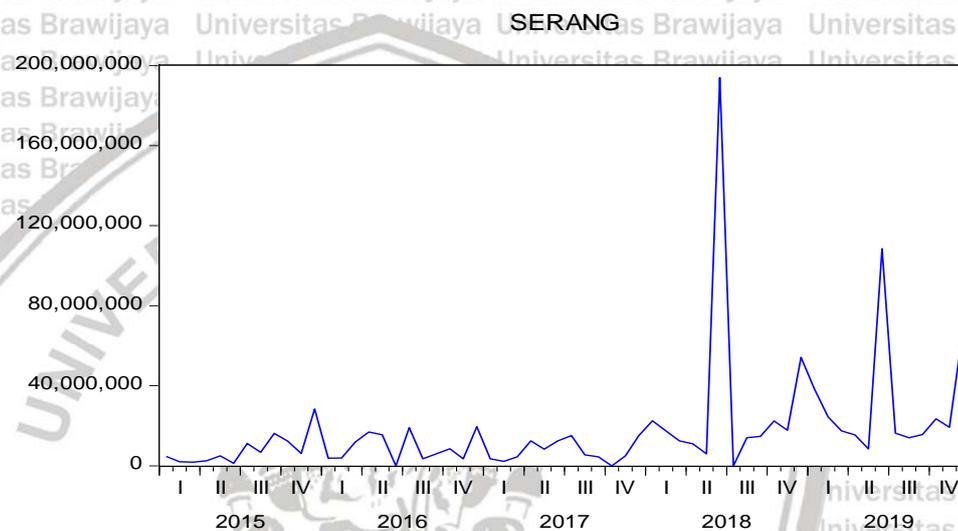
Tabel 4.11 merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo pada periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Berdasarkan Tabel 4.11 penerimaan retribusi Pantai Tambakrejo naik secara signifikan dibandingkan tahun 2019 dengan asumsi tahun 2020 tidak terdampak pandemi Covid-19.

4.5.2.2 Permodelan dan Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Serang

1. Time series Plot Penerimaan Retribusi Pantai Serang

Time series plot digunakan untuk melihat pola yang terbentuk dari data penerimaan retribusi Pantai Serang pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2019. Berikut merupakan hasil time series plot dari data penerimaan retribusi Pantai Serang di Kabupaten Blitar

Gambar 4.9 Time Series Plot Penerimaan Retribusi Pantai Serang



Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 4.9 diketahui bahwa penerimaan retribusi Pantai Serang mengalami fluktuatif, meskipun pada bulan tertentu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah kunjungan bukan pada waktu-waktu tertentu seperti libur hari raya, liburan sekolah, maupun liburan akhir tahun.

2. Identifikasi Model Penerimaan Retribusi Pantai Serang

Identifikasi model ARIMA digunakan untuk melihat pola kestasioneran data, baik stasioner dalam varians maupun mean. Hipotesis yang digunakan pada uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) adalah :

H_0 : data tersebut tidak stasioner

H_1 : data tersebut stasioner

Metode pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria, dimana jika ADF test statistic > Test Critical Value (critical value=5%) maka H0 ditolak, dan jika ADF test statistic < Test Critical Value (critical value=5%) maka H0 diterima. Berikut

Tabel 4.12 yang menunjukkan hasil uji stasioneritas.

Tabel 4.12 Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) Pantai Serang

Null Hypothesis: D(SERANG) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.432609	0.0000
Test critical values: 1% level	-2.608490	
5% level	-1.946996	
10% level	-1.612934	

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil pengujian didapatkan nilai test statistic dari ADF sebesar 7.432609 Nilai test statistic yang lebih besar dari test critical value 5% menunjukkan bahwa H0 ditolak. Hipotesis yang diterima adalah H1 yang menunjukkan data stasioner pada tingkat differencing.

Stasioner dalam mean dapat dilihat dari dari ACF, apabila pola turun cepat menuju nol, maka dapat dikatakan data sudah stasioner dalam mean.

Berikut merupakan ACF dan PACF pada tingkat differencing.

Tabel 4.13 ACF dan PACF Pantai Serang Tingkat Differencing

	ACF	PACF	Q-Stat	Probability
1	-0.525	-0.525	17.090	0.000
2	0.038	-0.327	17.182	0.000
3	-0.031	-0.272	17.245	0.001
4	0.025	-0.205	17.285	0.002
5	-0.107	-0.343	18.050	0.003
6	0.187	-0.143	20.433	0.002
7	-0.044	-0.022	20.565	0.004
8	-0.026	0.012	20.612	0.008
9	-0.009	0.034	20.618	0.014
10	0.001	0.039	20.618	0.024

Sumber : Data diolah, 2020

PACF pada tingkat differencing terlihat menurun secara cepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa data penerimaan Retribusi Pantai Serang sudah stasioner dalam mean. Maka dugaan model sementara yang diperoleh adalah $(1,1,1)$, $(1,1,0)$ dan $(0,1,1)$.

3. Estimasi Model ARIMA.

Estimasi model dugaan ARIMA yang diperoleh dari ACF dan PACF, pengujian parameter ARIMA yang dinyatakan dengan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : p value > 0,05 (parameter pada model ARIMA tidak signifikan)

H_1 : p value < 0,05 (parameter model ARIMA signifikan)

Pendugaan dan pengujian parameter model ARIMA data penerimaan Retribusi Pantai Serang disajikan dalam Tabel 4.14

Tabel 4.14 Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter Model ARIMA Penerimaan Retribusi Pantai Serang.

Model	Parameter	P-value	Akaike Info Criterion (AIC)
ARIMA (1,1,1)	AR 1	0.8277	37.24507
	MA 1	0.9690	
ARIMA (1,1,0)	AR 1	0.0000	37.67380
ARIMA (0,1,1)	MA 1	0.9844	37.23444

Sumber : Data diolah ,2020

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa model yang signifikan yaitu ARIMA (1,1,0) hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value < 0,05 dan AIC paling kecil dan signifikan. Sehingga diperoleh keputusan H_0 ditolak yang berarti parameter signifikan. Langkah selanjutnya adalah pada tahap peramalan.

4. Forecasting Penerimaan Retribusi Pantai Serang

Berikut merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Serang dengan menggunakan model ARIMA (1,1,0).

Tabel 4.15 Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Serang

Periode	Forecast Tahun 2020	Forecast Tahun 2021
Januari	51,298,413.50	61,079,124.98
Februari	52,113,472.79	61,894,184.27
Maret	52,928,532.08	62,709,243.56
April	53,743,591.37	63,524,302.85
Mei	54,558,650.66	64,339,362.14
Juni	55,373,709.95	65,154,421.43
Juli	56,188,769.24	65,969,480.72
Agustus	57,003,828.53	66,784,540.01
September	57,818,887.82	67,599,599.30
Oktober	58,633,947.11	68,414,658.59
November	59,449,006.40	69,229,717.88
Desember	60,264,065.69	70,044,777.17
Total	669,374,875.15	786,743,412.86

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel 4.15 merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Serang pada periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Berdasarkan Tabel 4.15 penerimaan retribusi Pantai Serang naik secara signifikan dibandingkan tahun 2019 yang nilai aktualnya mencapai Rp.369.453.000,- dengan asumsi tahun 2020 tidak terdampak pandemi Covid-19.

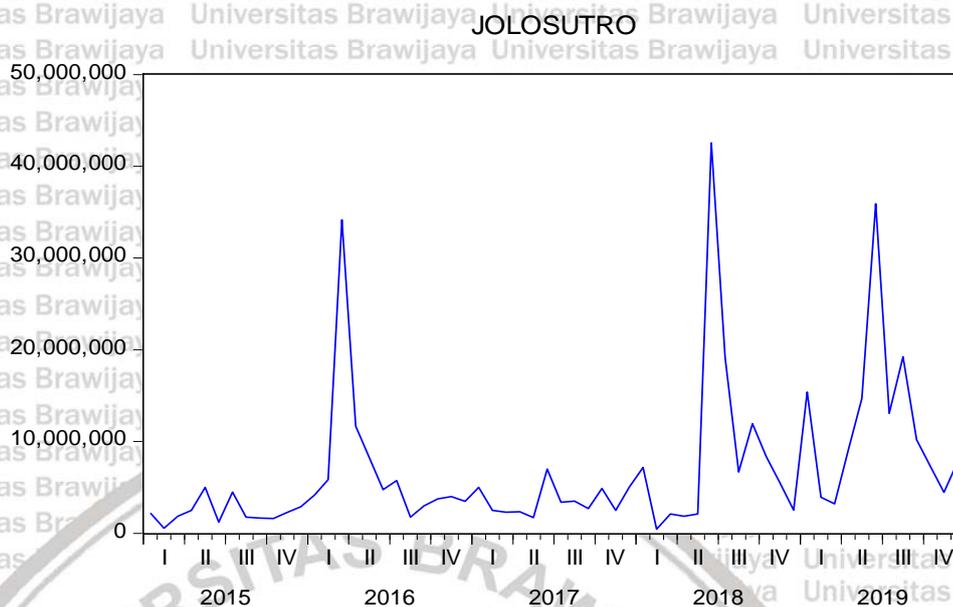
4.5.2.3 Permodelan dan Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai

Jolosutro

1. Time series Plot Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro

Time series plot digunakan untuk melihat pola yang terbentuk dari data penerimaan retribusi Pantai Jolosutro pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2019. Berikut merupakan hasil time series plot dari data penerimaan retribusi Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar

Gambar 4.10 Time Series Plot Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro



Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 4.10 diketahui bahwa penerimaan retribusi Pantai Jolosutro mengalami fluktuatif, meskipun pada bulan tertentu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah kunjungan bukan pada waktu-waktu tertentu seperti libur hari raya, liburan sekolah, maupun liburan akhir tahun.

2. Identifikasi Model Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro

Identifikasi model ARIMA digunakan untuk melihat pola kestasioneran data, baik stasioner dalam varians maupun mean. Hipotesis yang digunakan pada uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) adalah :

H_0 : data tersebut tidak stasioner

H_1 : data tersebut stasioner

Metode pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria, dimana jika ADF test statistic > Test Critical Value (critical value=5%) maka H_0 ditolak, dan jika ADF test statistic < Test Critical Value (critical value=5%) maka H_0 diterima. Berikut

Tabel 4.16 yang menunjukkan hasil uji stasioneritas.

Tabel 4.16 Hasil Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) Pantai Jolosutro

Null Hypothesis: D(JOLOSUTRO) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-11.13006	0.0000
Test critical values: 1% level	-2.605442	
5% level	-1.946549	
10% level	-1.613181	

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.16 hasil pengujian didapatkan nilai test statistic dari ADF sebesar 11.13006 Nilai test statistic yang lebih besar dari test critical value 5% menunjukkan bahwa H0 ditolak. Hipotesis yang diterima adalah H1 yang menunjukkan data stasioner pada tingkat differencing.

Stasioner dalam mean dapat dilihat dari dari ACF, apabila pola turun cepat menuju nol, maka dapat dikatakan data sudah stasioner dalam mean.

Berikut merupakan ACF dan PACF pada tingkat differencing.

Tabel 4.17 ACF dan PACF Pantai Jolosutro Tingkat Differencing

	ACF	PACF	Q-Stat	Probability
1	-0.370	-0.370	8.4888	0.004
2	-0.064	-0.233	8.7493	0.013
3	-0.007	-0.150	8.7525	0.033
4	-0.055	-0.167	8.9515	0.062
5	0.012	-0.123	8.9613	0.111
6	-0.101	-0.232	9.6506	0.140
7	0.139	-0.049	10.990	0.139
8	-0.057	-0.101	11.220	0.190
9	-0.047	-0.157	11.381	0.251
10	-0.021	-0.211	11.413	0.326

Sumber : Data diolah, 2020

PACF pada tingkat differencing terlihat menurun secara cepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa data penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro sudah stasioner dalam mean. Maka dugaan model sementara yang diperoleh adalah $(1,1,1)$, $(1,1,0)$ dan $(2,1,0)$.

3. Estimasi Model ARIMA.

Estimasi model dugaan ARIMA yang diperoleh dari ACF dan PACF, pengujian parameter ARIMA yang dinyatakan dengan hipotesis sebagai berikut.

H_0 : p value > 0,05 (parameter pada model ARIMA tidak signifikan)

H_1 : p value < 0,05 (parameter model ARIMA signifikan)

Pendugaan dan pengujian parameter model ARIMA data penerimaan Retribusi Pantai Serang disajikan dalam Tabel 4.18

Tabel 4.18 Estimasi dan Pengujian Signifikansi Parameter Model ARIMA Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro.

Model	Parameter	P-value	Akaike Info Criterion (AIC)
ARIMA (1,1,1)	AR 1	0.4058	34.71375
	MA 1	0.9998	
ARIMA (1,1,0)	AR 1	0.0003	34.94242
ARIMA (2,1,0)	AR 2	0.7079	35.08345

Sumber : Data diolah ,2020

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diketahui bahwa model yang signifikan yaitu ARIMA (1,1,0) hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value < 0,05 dan AIC paling kecil dan signifikan. Sehingga diperoleh keputusan H_0 ditolak yang berarti parameter signifikan. Langkah selanjutnya adalah pada tahap peramalan.

4. Forecasting Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro

Berikut merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Jolosutro dengan menggunakan model ARIMA (1,1,0).

Tabel 4.19 Hasil Peramalan Penerimaan Retribusi Pantai Jolosutro

Periode	Forecast Tahun 2020	Forecast tahun 2021
Januari	6,221,892.26	7,281,571.14
Februari	6,310,198.83	7,369,877.72
Maret	6,398,505.41	7,458,184.29
April	6,486,811.98	7,546,490.87
Mei	6,575,118.55	7,634,797.44
Juni	6,663,425.13	7,723,104.01
Juli	6,751,731.70	7,811,410.59
Agustus	6,840,038.28	7,899,717.16
September	6,928,344.85	7,988,023.74
Oktober	7,016,651.42	8,076,330.31
November	7,104,958.00	8,164,636.88
Desember	7,193,264.57	8,252,943.46
Total	80,490,940.98	93,207,807.62

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel 4.19 merupakan hasil peramalan penerimaan retribusi Pantai Jolosutro pada periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Berdasarkan Tabel 4.11 penerimaan retribusi Pantai Jolosutro naik secara signifikan dengan asumsi tahun 2020 tidak terdampak pandemi Covid-19.

4.5.3 Strategi Pengembangan

Dari hasil simulasi diatas diperlukan strategi dalam pengembangan potensi retribusi pariwisata pantai di Kabupaten Blitar khususnya dalam pengelolaan Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro sehingga tercapainya peningkatan dalam penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan PADes (Pendapatan Asli Desa). Berikut merupakan strategi-strategi yang dapat dilakukan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan PAD maupun PADes.

Tabel 4.20 Faktor Internal dan Eksternal Pengelolaan Wisata Pantai

No.	Aspek	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
		Stregths (kekuatan)	Weaknesses (kelemahan)	Opportunity (peluang)	Threat (ancaman)
1.	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata antara Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar, dan Pemdes setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha belum sesuai dengan penerapan di masing-masing obyek wisata pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat linkage system terkait pariwisata/program paket wisata oleh Baparda. 	
2.	Sarana dan Prasarana		<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya hotel/penginapan disekitar objek pariwisata Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai seperti akses jalan menuju tempa wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rencana pengembangan bandar udara internasional. Beberapa infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan seperti jalan lintas selatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana pendukung membuat keamanan pengunjung kurang terjamin.
3.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya minat kunjungan wisatawan dilihat dari penerimaan retribusi pantai yang semakin meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> Moda promosi yang kurang sehingga objek wisata belum diketahui pengunjung. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penambahan objek retribusi toko/kios, retribusi parkir dan pajak hiburan. Menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak masyarakat yang belum sadar retribusi.

Sumber : Hasil Survey Primer

Tabel 4.21 Analisis SWOT Pariwisata Pantai di Kabupaten Blitar

SWOT		INTERNAL		
		Strength	Weakness	
		<ul style="list-style-type: none"> MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata antara Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar, dan Pemerintah Desa setempat. Tingginya minat kunjungan wisatawan dilihat dari penerimaan retribusi pantai yang semakin meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha belum sesuai dengan penerapan di masing-masing obyek wisata pantai. Belum tersedianya hotel/penginapan disekitar objek pariwisata Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai seperti akses jalan menuju tempa wisata. Moda promosi yang kurang sehingga objek wisata belum diketahui pengunjung. 	
EKSTERNAL	Opportunity	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat linkage system terkait pariwisata/program paket wisata oleh Baparda. Adanya rencana pengembangan bandar udara internasional. Beberapa infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan seperti jalan lintas selatan. Terdapat penambahan objek retribusi toko/kios, retribusi parkir dan pajak hiburan. Menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. 	<p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen perencanaan sektor pariwisata pantai secara komprehensif sehingga dapat dijadikan pedoman perencanaan sektor pariwisata. Melakukan Inventarisasi objek potensi retribusi wisata pantai. Pembekalan dan pelatihan terhadap pelaku dan pengelola objek wisata pantai dalam upaya peningkatan kualitas SDM pengelola wisata. Memperkuat jalinan kerjasama antara Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar, dan Pemdes setempat. 	<p>Strategi W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerjasama dengan pihak akademisi dalam upaya penyempurnaan produk hukum terkait. Menjalin kerjasama dengan pihak akademisi dalam menyusun dokumen perencanaan pariwisata. Promosi wisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata pantai untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan sektor transportasi sebagai penunjang mobilitas wisatawan.
	Threat	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana pendukung membuat keamanan pengunjung kurang terjamin. Masih banyak masyarakat yang belum sadar retribusi 	<p>Strategi S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya sosialisasi pentingnya kewajiban membayar pajak/retribusi didalam kawasan wisata agar tidak menimbulkan konflik dalam proses pemungutan retribusi. Mempertegas sanksi pelanggaran bagi pelanggar pajak maupun retribusi. 	<p>Strategi W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperkuat petugas pemungutan retribusi di tempat wisata.

Sumber : Hasil Survei Primer, Diolah

Bedasarkan hasil analisa tersebut maka beberapa strategi dalam upaya melakukan pengembangan potensi pendapatan retribusi dari sektor pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Retribusi Wisata

- Menyusun dokumen perencanaan sektor pariwisata pantai secara komprehensif sehingga dapat dijadikan pedoman perencanaan sektor pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar.

- Promosi wisata pantai untuk meningkatkan jumlah pengunjung.
- Peningkatan kualitas infrastuktur jalan menuju lokasi wisata.
- Meningkatkan aksesibilitas menuju lokasi wisata.
- Peningkatan kualitas infrastuktur telekomunikasi pada lokasi wisata serta melakukan inventarisasi lokasi potensial pendirian menara telekomunikasi.

2. Retribusi Parkir

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak/retribusi parkir.
- Menyusun dokumen kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perhutani KPH Blitar, Pemerintah Desa dan masyarakat terkait pengelolaan potensi retribusi parkir agar tidak menimbulkan konflik.
- Meningkatkan jaminan keamanan pada lokasi parkir khususnya pada aktivitas pariwisata dengan pemasangan cctv.

3. Retribusi Toko atau Kios

- Melakukan inventarisasi potensi objek retribusi toko atau kios.

- Menyusun peraturan daerah tentang pengenaan tarif retribusi toko atau kios dalam kawasan wisata dengan melibatkan masyarakat.
- Penataan toko atau kios dalam kawasan wisata supaya lebih rapi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penulisan yang ditetapkan yaitu untuk mengetahui potensi retribusi dan strategi perencanaan pariwisata pantai terhadap pendapatan asli desa di Kabupaten Blitar, beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah:

1. Potensi retribusi pariwisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro belum tergali secara optimal. Retribusi tersebut meliputi retribusi parkir dan retribusi toko/kios didalam kawasan wisata pantai.
2. Penerimaan retribusi pariwisata pantai mengalami peningkatan yang fluktuasi dan signifikan antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan perubahan tarif tiket masuk kawasan wisata dengan dilaksanakannya MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pariwisata Pantai di Kabupaten Blitar.
3. MOU Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pariwisata Pantai dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pelaksanaannya memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan MOU Tahun 2018 pengelolaan wisata pantai menerapkan sistem bagi hasil retribusi 50% kepada Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan wisata pantai. Sedangkan 25% bagi hasil retribusi diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Perhutani KPH Blitar yang bertugas untuk melakukan publikasi dan perbaikan sarana prasarana wisata pantai.

Hanya saja MOU Tahun 2018 bersifat sementara/Kotrak dalam tempo 1 tahun.

4. Berdasarkan Uji Forecasting penerimaan retribusi wisata pantai mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan asumsi tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terdampak pandemi Covid-19.

5.2 Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan penelitian mengenai optimalisasi potensi retribusi wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi kebijakan objek wisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang dan Pantai Jolosutro sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan sektor pariwisata pantai secara komprehensif sehingga dapat dijadikan pedoman perencanaan sektor pariwisata pantai khususnya Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar dan promosi wisata pantai untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Hal tersebut perlu dilakukan karena apabila pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan) yang melewati pesisir pantai di Kabupaten Blitar dan menghubungkan Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Kabupaten Pacitan telah selesai maka akan banyak persaingan antara beberapa kabupaten dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung.
2. Menyusun kebijakan antara Pemda Kabupaten Blitar, Perhutani KPH Blitar, dan Pemdes setempat terkait potensi retribusi parkir dan retribusi toko/kios dalam kawasan wisata guna meningkatkan pendapatan retribusi pantai. Dalam menyusun kebijakan perlu dipertimbangkan keadaan

ekonomi masyarakat. Sehingga agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat dan pengelolaan wisata pantai tetap berjalan secara optimal.

3. Perlu adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju lokasi wisata dan infrastruktur telekomunikasi dalam lokasi wisata.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang optimalisasi potensi retribusi pariwisata Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar, maka penulis ingin menyampaikan beberapa keterbatasan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penelitian, data yang diperoleh dari Pemerintah Desa setempat hanya melalui tehnik wawancara dan dokumentasi, sehingga beberapa data harus dicek kembali pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dan BAPENDA Kabupaten Blitar terkait dengan bagi hasil retribusi pengelolaan wisata pantai berdasarkan MUO Tahun 2018.
2. Data penelitian yang terbatas yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan asumsi tidak memperhitungkan dampak pandemic Covid-19. Berdasarkan hal ini perlu dilakukan penelitian terkait pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Dinoroy M. 2016. *Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year*

2014. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.12, No. 3, September.

Bratakusuma, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Cantika, Bella. Imam Hanafi., dan Abdul Wachid. 2013. *Kontribusi Retribusi Pasar Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No.4, Universitas Brawijaya.

Capriati, Christia. 2015. *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Vol. 4, No. 1, Universitas Brawijaya.

Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampal Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP UMP YKPN.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Inggawati, Mei Rizki Dwi. 2013. *Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol. 2, No. 1.

Mahmudi. 2002. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Pleanggra, Ferry dan Edy Yusuf A.G. 2012. *Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Reribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Vol. 1, No. 1, Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet 2012 Metode.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Tekad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wei, W. W. S. 2006. *Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods*. Canada: Addison-Wesley Publishing Company
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yoeti, Oka A. 2002. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: PT Perca.
- _____. 2004. Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- _____. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 13 Tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Umum.

2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2019. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



1	2	3	4
	2. Hiburan musik/Orkes Melayu	10.000,00	Per Orang
	f. Kendaraan Parkir dalam Kawasan Wisata Penataran :		
	1. Bus	3.000,00	Sekali parkir
	2. Mini Bus dan sejenisnya	2.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda motor	1.000,00	Sekali parkir
	g. Permainan Flying Fox	10.000,00	Per Orang tiap satu lai pakai
	2. Kawasan Wisata Pantai Tambakrejo, Serang dan Jolosutro :		
	a. Masuk Kawasan Wisata Pantai :		
	1. Dewasa	3.000,00	Per Orang
	2. Anak-anak	2.000,00	Per Anak
	3. Rombongan mendapat discount 15%	-	Apabila dalam 1 rombongan berjumlah minimal 25 orang
	b. Masuk Tempat Hiburan/Kesenian (Bersifat Insidentil :		
	1. Kesenian dan sejenisnya	5.000,00	Per Orang
	2. Hiburan Musik/Orkes Melayu	10.000,00	Per orang
	c. Kendaraan parkir dalam kawasan wisata :		
	1. Bus	3.000,00	Sekali parkir
	2. Mini Bus	2.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda Motor	1.000,00	Sekali parkir
	3. Kawasan Wisata Olak-Alen :		
	a. Masuk Kawasan Wisata	1.000,00	Per Mobil
	b. Masuk Kawasan Wisata	500,00	Per Sepeda Motor
	c. Parkir :		
	1. Kendaraan Roda 4 (empat)	1.000,00	Sekali parkir

1	2	3	4
	2. Kendaraan Roda 2 (dua)	500,00	Sekali Parkir
4.	Kawasan Wisata Umbul Tuk :		
	a. Masuk Kawasan Wisata Goa Alam		
	Umbul Tuk :		
	1. Dewasa	3.000,00	Per Orang
	2. Anak-anak	2.000,00	Per Anak
	3. Rombongan mendapat discount 15%	-	Apabila dalam satu rombongan berjumlah minimal 25 orang
	b. Masuk Tempat Hiburan/Kesenian :		
	1. Kesenian Tradisional dan sejenisnya	5.000,00	Per Orang
	2. Hiburan Musik/Orkes Melayu	10.000,00	Per Orang
	c. Kendaraan Parkir dalam Kawasan Wisata :		
	1. Bus Besar	3.000,00	Sekali parkir
	2. Mini Bus dan sejenisnya	2.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda motor	1.000,00	Sekali parkir
5.	Kawasan Wisata Rambut Monte :		
	a. Masuk Kawasan Wisata Rambut Monte		
	1. Dewasa	3.000,00	Per Orang
	2. Anak-anak	2.000,00	Per Anak
	3. Rombongan mendapat discount 15%	-	Apabila dalam satu rombongan minimal 25 orang
	b. Masuk Tempat Hiburan/Kesenian :		
	1. Kesenian Tradisional dan sejenisnya	5.000,00	Per Orang
	2. Hiburan Musik/Orkes Melayu	10.000,00	Per Orang

1	2	3	4
	c. Kendaraan Parkir dalam Kawasan Wisata :		
	1. Bus besar	3.000,00	Sekali parkir
	2. Mini Bus dan sejenisnya	2.000,00	Sekali parkir
	3. Sepeda motor	1.000,00	Sekali parkir
6.	Untuk Perkemahan didalam kawasan Wisata penataran	10.000,00	Per hari untuk setiap regu (setiap regu maksimal 12 orang)

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian

No.	Nama Tempat Wisata	Alamat	Jumlah Kunjungan Dewasa	Jumlah Kunjungan Anak-Anak	Jumlah Kunjungan Rombongan > 30 orang	Jumlah Kios/Toko	Jenis Layanan (sewa alat dll)
1.	Pantai Tambakrejo						
2.	Pantai Serang						
3.	Pantai Jolosutro						

Lampiran 3. Perhitungan Pendapatan Retribusi Pariwisata

Pantai Tambakrejo 2019							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (25%)	Perhutani (25%)	Pemdes Tambakrejo (50%)
Januari	23,915	167,405,000	25,110,750	8,370,250	33,481,000	33,481,000	66,962,000
Februari	15,989	111,923,000	16,788,450	5,596,150	22,384,600	22,384,600	44,769,200
Maret	9,098	63,686,000	9,552,900	3,184,300	12,737,200	12,737,200	25,474,400
April	9,998	69,986,000	10,497,900	3,499,300	13,997,200	13,997,200	27,994,400
Mei	13,298	93,086,000	13,962,900	4,654,300	18,617,200	18,617,200	37,234,400
Juni	6,101	42,707,000	6,406,050	2,135,350	8,541,400	8,541,400	17,082,800
Juli	30,205	211,435,000	31,715,250	10,571,750	42,287,000	42,287,000	84,574,000
Agustus	21,403	149,821,000	22,473,150	7,491,050	29,964,200	29,964,200	59,928,400
September	7,001	49,007,000	7,351,050	2,450,350	9,801,400	9,801,400	19,602,800
Oktober	7,000	49,000,000	7,350,000	2,450,000	9,800,000	9,800,000	19,600,000
November	15,002	105,014,000	15,752,100	5,250,700	21,002,800	21,002,800	42,005,600
Desember	30,000	210,000,000	31,500,000	10,500,000	42,000,000	42,000,000	84,000,000
Jumlah		1,323,070,000	198,460,500	66,153,500	264,614,000	264,614,000	529,228,000

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2020)

Pantai Tambakrejo 2018							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA	Asuransi	Pemda Kabupaten Blitar	Perhutani	Pemdes Tambakrejo
Januari	23,600	118,000,000	17,700,000	5,900,000	42,480,000	42,480,000	9,440,000
Februari	12,300	61,500,000	9,225,000	3,075,000	22,140,000	22,140,000	4,920,000
Maret	13,200	66,000,000	9,900,000	3,300,000	23,760,000	23,760,000	5,280,000
April	16,000	80,000,000	12,000,000	4,000,000	28,800,000	28,800,000	6,400,000
Mei	700	3,500,000	525,000	175,000	1,260,000	1,260,000	280,000
Juni	7,500	52,500,000	7,875,000	2,625,000	10,500,000	10,500,000	21,000,000
Juli	27,457	192,199,000	28,829,850	9,609,950	38,439,800	38,439,800	76,879,600
Agustus	7,400	51,800,000	7,770,000	2,590,000	10,360,000	10,360,000	20,720,000
September	11,665	81,655,000	12,248,250	4,082,750	16,331,000	16,331,000	32,662,000
Oktober	11,400	79,800,000	11,970,000	3,990,000	15,960,000	15,960,000	31,920,000
November	8,998	62,986,000	9,447,900	3,149,300	12,597,200	12,597,200	25,194,400
Desember	20,790	145,530,000	21,829,500	7,276,500	29,106,000	29,106,000	58,212,000
Jumlah		995,470,000	149,320,500	49,773,500	251,734,000	251,734,000	292,908,000

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019)

*sebelum kerja sama tiket @ Rp. 5,000. Dengan pembagian BAPENDA 15%, Asuransi 5%, dan 3 pihak 80% (Pemda 45%, Perhutani 45%, Pemdes 10%)

** Kerjasama dimulai bulan Juni 2018 dengan harga tiket @ Rp. 7,000. Dengan pembagian BAPENDA 15%, Asuransi 5%, dan 3 pihak 80% (Pemda 25%, Perhutani 25% dan Pemdes 50%)

Pantai Tambakrejo 2017							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Tambakrejo (10%)
Januari	15,900	79,500,000	11,925,000	3,975,000	28,620,000	28,620,000	6,360,000
Februari	7,500	37,500,000	5,625,000	1,875,000	13,500,000	13,500,000	3,000,000
Maret	8,700	43,500,000	6,525,000	2,175,000	15,660,000	15,660,000	3,480,000
April	8,300	41,500,000	6,225,000	2,075,000	14,940,000	14,940,000	3,320,000
Mei	8,000	40,000,000	6,000,000	2,000,000	14,400,000	14,400,000	3,200,000
Juni	9,800	49,000,000	7,350,000	2,450,000	17,640,000	17,640,000	3,920,000
Juli	14,350	71,750,000	10,762,500	3,587,500	25,830,000	25,830,000	5,740,000
Agustus	4,700	23,500,000	3,525,000	1,175,000	8,460,000	8,460,000	1,880,000
September	9,100	45,500,000	6,825,000	2,275,000	16,380,000	16,380,000	3,640,000
Oktober	9,432	47,160,000	7,074,000	2,358,000	16,977,600	16,977,600	3,772,800
November	8,950	44,750,000	6,712,500	2,237,500	16,110,000	16,110,000	3,580,000
Desember	11,524	57,620,000	8,643,000	2,881,000	20,743,200	20,743,200	4,609,600
Jumlah		581,280,000	87,192,000	29,064,000	209,260,800	209,260,800	46,502,400

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018)

Pantai Tambakrejo 2016							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Tambakrejo (10%)
Januari	15,067	75,335,000	11,300,250	3,766,750	27,120,600	27,120,600	6,026,800
Februari	18,967	94,835,000	14,225,250	4,741,750	34,140,600	34,140,600	7,586,800
Maret	23,234	116,170,000	17,425,500	5,808,500	41,821,200	41,821,200	9,293,600
April	26,634	133,170,000	19,975,500	6,658,500	47,941,200	47,941,200	10,653,600
Mei	6,700	33,500,000	5,025,000	1,675,000	12,060,000	12,060,000	2,680,000
Juni	1,900	9,500,000	1,425,000	475,000	3,420,000	3,420,000	760,000
Juli	14,200	71,000,000	10,650,000	3,550,000	25,560,000	25,560,000	5,680,000
Agustus	5,900	29,500,000	4,425,000	1,475,000	10,620,000	10,620,000	2,360,000
September	4,100	20,500,000	3,075,000	1,025,000	7,380,000	7,380,000	1,640,000
Oktober	4,900	24,500,000	3,675,000	1,225,000	8,820,000	8,820,000	1,960,000
November	6,000	30,000,000	4,500,000	1,500,000	10,800,000	10,800,000	2,400,000
Desember	3,900	19,500,000	2,925,000	975,000	7,020,000	7,020,000	1,560,000
Jumlah		657,510,000	98,626,500	32,875,500	236,703,600	236,703,600	52,600,800

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017)

Pantai Tambakrejo 2015							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Tambakrejo (10%)
Januari	5,400	27,000,000	4,050,000	1,350,000	9,720,000	9,720,000	2,160,000
Februari	3,456	17,280,000	2,592,000	864,000	6,220,800	6,220,800	1,382,400
Maret	4,563	22,815,000	3,422,250	1,140,750	8,213,400	8,213,400	1,825,200
April	1,400	7,000,000	1,050,000	350,000	2,520,000	2,520,000	560,000
Mei	5,300	26,500,000	3,975,000	1,325,000	9,540,000	9,540,000	2,120,000
Juni	3,300	16,500,000	2,475,000	825,000	5,940,000	5,940,000	1,320,000
Juli	25,000	125,000,000	18,750,000	6,250,000	45,000,000	45,000,000	10,000,000
Agustus	1,600	8,000,000	1,200,000	400,000	2,880,000	2,880,000	640,000
September	5,324	26,620,000	3,993,000	1,331,000	9,583,200	9,583,200	2,129,600
Oktober	7,567	37,835,000	5,675,250	1,891,750	13,620,600	13,620,600	3,026,800
November	6,200	31,000,000	4,650,000	1,550,000	11,160,000	11,160,000	2,480,000
Desember	10,234	51,170,000	7,675,500	2,558,500	18,421,200	18,421,200	4,093,600
Jumlah		396,720,000	59,508,000	19,836,000	142,819,200	142,819,200	31,737,600

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2016)

Pantai Serang 2019							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (25%)	Perhutani (25%)	Pemdes Serang (50%)
Januari	5,477	38,339,000	5,750,850	1,916,950	7,667,800	7,667,800	15,335,600
Februari	3,500	24,500,000	3,675,000	1,225,000	4,900,000	4,900,000	9,800,000
Maret	2,500	17,500,000	2,625,000	875,000	3,500,000	3,500,000	7,000,000
April	2,200	15,400,000	2,310,000	770,000	3,080,000	3,080,000	6,160,000
Mei	1,200	8,400,000	1,260,000	420,000	1,680,000	1,680,000	3,360,000
Juni	15,502	108,514,000	16,277,100	5,425,700	21,702,800	21,702,800	43,405,600
Juli	2,325	16,275,000	2,441,250	813,750	3,255,000	3,255,000	6,510,000
Agustus	2,000	14,000,000	2,100,000	700,000	2,800,000	2,800,000	5,600,000
September	2,225	15,575,000	2,336,250	778,750	1,869,000	1,869,000	8,722,000
Oktober	3,356	23,492,000	3,523,800	1,174,600	4,698,400	4,698,400	9,396,800
November	2,751	19,257,000	2,888,550	962,850	3,851,400	3,851,400	7,702,800
Desember	9,743	68,201,000	10,230,150	3,410,050	8,184,120	8,184,120	38,192,560
Jumlah		369,453,000	55,417,950	18,472,650	67,188,520	67,188,520	161,185,360

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2020)

*Pada Bulan September dan Desember Pemdes Serang mendapatkan hak 70% dari pendapatan dikarenakan Serang Culture Festival dan Tahun Baru. Pemda dan Perhutani 15%

Pantai Serang 2018							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA	Asuransi	Pemda Kabupaten Blitar	Perhutani	Pemdes Serang
Januari	4,500	22,500,000	3,375,000	1,125,000	8,100,000	8,100,000	1,800,000
Februari	3,500	17,500,000	2,625,000	875,000	6,300,000	6,300,000	1,400,000
Maret	2,500	12,500,000	1,875,000	625,000	4,500,000	4,500,000	1,000,000
April	2,200	11,000,000	1,650,000	550,000	3,960,000	3,960,000	880,000
Mei	1,200	6,000,000	900,000	300,000	2,160,000	2,160,000	480,000
Juni	27,700	193,900,000	29,085,000	9,695,000	38,780,000	38,780,000	77,560,000
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	2,000	14,000,000	2,100,000	700,000	2,800,000	2,800,000	5,600,000
September	2,100	14,700,000	2,205,000	735,000	1,764,000	1,764,000	8,232,000
Oktober	3,200	22,400,000	3,360,000	1,120,000	4,480,000	4,480,000	8,960,000
November	2,536	17,752,000	2,662,800	887,600	3,550,400	3,550,400	7,100,800
Desember	7,743	54,201,000	8,130,150	2,710,050	6,504,120	6,504,120	30,352,560
Jumlah		386,453,000	57,967,950	19,322,650	82,898,520	82,898,520	143,365,360

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka)

*sebelum kerja sama tiket @ Rp. 5,000. Dengan pembagian BAPENDA 15%, Asuransi 5%, dan 3 pihak 80% (Pemda 45%, Perhutani 45%, Pemdes 10%)

** Kerjasama dimulai bulan Juni 2018 dengan harga tiket @ Rp. 7,000. Dengan pembagian BAPENDA 15%, Asuransi 5%, dan 3 pihak 80% (Pemda 25%, Perhutani 25% dan Pemdes 50%)

***Pada Bulan September dan Desember Pemdes Serang mendapatkan hak 70% dari pendapatan dikarenakan Serang Culture Festival dan Tahun Baru. Pemda dan Perhutani 15%

Pantai Serang 2017							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Serang (10%)
Januari	700	3,500,000	525,000	175,000	1,260,000	1,260,000	280,000
Februari	450	2,250,000	337,500	112,500	810,000	810,000	180,000
Maret	903	4,515,000	677,250	225,750	1,625,400	1,625,400	361,200
April	2,500	12,500,000	1,875,000	625,000	4,500,000	4,500,000	1,000,000
Mei	1,654	8,270,000	1,240,500	413,500	2,977,200	2,977,200	661,600
Juni	2,500	12,500,000	1,875,000	625,000	4,500,000	4,500,000	1,000,000
Juli	3,012	15,060,000	2,259,000	753,000	5,421,600	5,421,600	1,204,800
Agustus	1,100	5,500,000	825,000	275,000	1,980,000	1,980,000	440,000
September	900	4,500,000	675,000	225,000	1,620,000	1,620,000	360,000
Oktober		-	-	-	-	-	-
November	1,000	5,000,000	750,000	250,000	1,800,000	1,800,000	400,000
Desember	3,014	15,070,000	2,260,500	753,500	5,425,200	5,425,200	1,205,600
Jumlah		88,665,000	13,299,750	4,433,250	31,919,400	31,919,400	7,093,200

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018)

Pantai Serang 2016							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Serang (10%)
Januari	767	3,835,000	575,250	191,750	1,380,600	1,380,600	306,800
Februari	768	3,840,000	576,000	192,000	1,382,400	1,382,400	307,200
Maret	2,367	11,835,000	1,775,250	591,750	4,260,600	4,260,600	946,800
April	3,367	16,835,000	2,525,250	841,750	6,060,600	6,060,600	1,346,800
Mei	3,100	15,500,000	2,325,000	775,000	5,580,000	5,580,000	1,240,000
Juni		-	-	-	-	-	-
Juli	3,800	19,000,000	2,850,000	950,000	6,840,000	6,840,000	1,520,000
Agustus	700	3,500,000	525,000	175,000	1,260,000	1,260,000	280,000
September	1,200	6,000,000	900,000	300,000	2,160,000	2,160,000	480,000
Oktober	1,700	8,500,000	1,275,000	425,000	3,060,000	3,060,000	680,000
November	700	3,500,000	525,000	175,000	1,260,000	1,260,000	280,000
Desember	3,901	19,505,000	2,925,750	975,250	7,021,800	7,021,800	1,560,400
Jumlah		111,850,000	16,777,500	5,592,500	40,266,000	40,266,000	8,948,000

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017)

Pantai Serang 2015							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Serang (10%)
Januari	937	4,685,000	702,750	234,250	1,686,600	1,686,600	374,800
Februari	400	2,000,000	300,000	100,000	720,000	720,000	160,000
Maret	370	1,850,000	277,500	92,500	666,000	666,000	148,000
April	500	2,500,000	375,000	125,000	900,000	900,000	200,000
Mei	1,000	5,000,000	750,000	250,000	1,800,000	1,800,000	400,000
Juni	245	1,225,000	183,750	61,250	441,000	441,000	98,000
Juli	2,235	11,175,000	1,676,250	558,750	4,023,000	4,023,000	894,000
Agustus	1,346	6,730,000	1,009,500	336,500	2,422,800	2,422,800	538,400
September	3,245	16,225,000	2,433,750	811,250	5,841,000	5,841,000	1,298,000
Oktober	2,467	12,335,000	1,850,250	616,750	4,440,600	4,440,600	986,800
November	1,237	6,185,000	927,750	309,250	2,226,600	2,226,600	494,800
Desember	5,678	28,390,000	4,258,500	1,419,500	10,220,400	10,220,400	2,271,200
Jumlah		98,300,000	14,745,000	4,915,000	35,388,000	35,388,000	7,864,000

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2016)

Pantai Jolosutro 2019							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (25%)	Perhutani (25%)	Pemdes Ringinrejo (50%)
Januari	2,200	15,400,000	2,310,000	770,000	3,080,000	3,080,000	6,160,000
Februari	560	3,920,000	588,000	196,000	784,000	784,000	1,568,000
Maret	460	3,220,000	483,000	161,000	644,000	644,000	1,288,000
April	1,300	9,100,000	1,365,000	455,000	1,820,000	1,820,000	3,640,000
Mei	2,100	14,700,000	2,205,000	735,000	2,940,000	2,940,000	5,880,000
Juni	5,130	35,910,000	5,386,500	1,795,500	7,182,000	7,182,000	14,364,000
Juli	1,870	13,090,000	1,963,500	654,500	2,618,000	2,618,000	5,236,000
Agustus	2,747	19,229,000	2,884,350	961,450	3,845,800	3,845,800	7,691,600
September	1,456	10,192,000	1,528,800	509,600	2,038,400	2,038,400	4,076,800
Oktober	1,043	7,301,000	1,095,150	365,050	1,460,200	1,460,200	2,920,400
November	639	4,473,000	670,950	223,650	894,600	894,600	1,789,200
Desember	1,115	7,805,000	1,170,750	390,250	1,561,000	1,561,000	3,122,000
Jumlah		144,340,000	21,651,000	7,217,000	28,868,000	28,868,000	57,736,000

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2020)

Pantai Jolosutro 2018							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA	Asuransi	Pemda Kabupaten Blitar	Perhutani	Pemdes Ringinrejo
Januari	1,437	7,185,000	1,077,750	359,250	2,586,600	2,586,600	574,800
Februari	90	450,000	67,500	22,500	162,000	162,000	36,000
Maret	420	2,100,000	315,000	105,000	756,000	756,000	168,000
April	370	1,850,000	277,500	92,500	666,000	666,000	148,000
Mei	420	2,100,000	315,000	105,000	756,000	756,000	168,000
Juni	6,080	42,560,000	6,384,000	2,128,000	8,512,000	8,512,000	17,024,000
Juli	2,736	19,152,000	2,872,800	957,600	3,830,400	3,830,400	7,660,800
Agustus	953	6,671,000	1,000,650	333,550	1,334,200	1,334,200	2,668,400
September	1,706	11,942,000	1,791,300	597,100	2,388,400	2,388,400	4,776,800
Oktober	1,193	8,351,000	1,252,650	417,550	1,670,200	1,670,200	3,340,400
November	789	5,523,000	828,450	276,150	1,104,600	1,104,600	2,209,200
Desember	360	2,520,000	378,000	126,000	504,000	504,000	1,008,000
Jumlah		110,404,000	16,560,600	5,520,200	24,270,400	24,270,400	39,782,400

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019)

*sebelum kerja sama tiket @ Rp. 5,000. Dengan pembagian BAPENDA 15%, Asuransi 5%, dan 3 pihak 80% (Pemda 45%, Perhutani 45%, Pemdes 10%)

** Kerjasama dimulai bulan Juni 2018 dengan harga tiket @ Rp. 7,000. Dengan pembagian BAPENDA 15%, Asuransi 5%, dan 3 pihak 80% (Pemda 25%, Perhutani 25% dan Pemdes 50%)

Pantai Jolosutro 2017							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Ringinrejo (10%)
Januari	1,000	5,000,000	750,000	250,000	1,800,000	1,800,000	400,000
Februari	500	2,500,000	375,000	125,000	900,000	900,000	200,000
Maret	460	2,300,000	345,000	115,000	828,000	828,000	184,000
April	472	2,360,000	354,000	118,000	849,600	849,600	188,800
Mei	340	1,700,000	255,000	85,000	612,000	612,000	136,000
Juni	1,400	7,000,000	1,050,000	350,000	2,520,000	2,520,000	560,000
Juli	675	3,375,000	506,250	168,750	1,215,000	1,215,000	270,000
Agustus	700	3,500,000	525,000	175,000	1,260,000	1,260,000	280,000
September	540	2,700,000	405,000	135,000	972,000	972,000	216,000
Oktober	975	4,875,000	731,250	243,750	1,755,000	1,755,000	390,000
November	498	2,490,000	373,500	124,500	896,400	896,400	199,200
Desember	1,004	5,020,000	753,000	251,000	1,807,200	1,807,200	401,600
Jumlah		42,820,000	6,423,000	2,141,000	15,415,200	15,415,200	3,425,600

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018)

Pantai Jolosutro 2016							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Ringinrejo (10%)
Januari	834	4,170,000	625,500	208,500	1,501,200	1,501,200	333,600
Februari	1,167	5,835,000	875,250	291,750	2,100,600	2,100,600	466,800
Maret	6,834	34,170,000	5,125,500	1,708,500	12,301,200	12,301,200	2,733,600
April	2,334	11,670,000	1,750,500	583,500	4,201,200	4,201,200	933,600
Mei	1,650	8,250,000	1,237,500	412,500	2,970,000	2,970,000	660,000
Juni	950	4,750,000	712,500	237,500	1,710,000	1,710,000	380,000
Juli	1,150	5,750,000	862,500	287,500	2,070,000	2,070,000	460,000
Agustus	350	1,750,000	262,500	87,500	630,000	630,000	140,000
September	600	3,000,000	450,000	150,000	1,080,000	1,080,000	240,000
Oktober	750	3,750,000	562,500	187,500	1,350,000	1,350,000	300,000
November	800	4,000,000	600,000	200,000	1,440,000	1,440,000	320,000
Desember	698	3,490,000	523,500	174,500	1,256,400	1,256,400	279,200
Jumlah		90,585,000	13,587,750	4,529,250	32,610,600	32,610,600	7,246,800

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017)

Pantai Jolosutro 2015							
Bulan	Jumlah Kunjungan	Pendapatan Tiket	BAPENDA (15%)	Asuransi (5%)	Pemda Kabupaten Blitar (45%)	Perhutani (45%)	Pemdes Ringinrejo (10%)
Januari	438	2,190,000	328,500	109,500	788,400	788,400	175,200
Februari	110	550,000	82,500	27,500	198,000	198,000	44,000
Maret	370	1,850,000	277,500	92,500	666,000	666,000	148,000
April	500	2,500,000	375,000	125,000	900,000	900,000	200,000
Mei	1,000	5,000,000	750,000	250,000	1,800,000	1,800,000	400,000
Juni	245	1,225,000	183,750	61,250	441,000	441,000	98,000
Juli	900	4,500,000	675,000	225,000	1,620,000	1,620,000	360,000
Agustus	350	1,750,000	262,500	87,500	630,000	630,000	140,000
September	333	1,665,000	249,750	83,250	599,400	599,400	133,200
Oktober	323	1,615,000	242,250	80,750	581,400	581,400	129,200
November	456	2,280,000	342,000	114,000	820,800	820,800	182,400
Desember	578	2,890,000	433,500	144,500	1,040,400	1,040,400	231,200
Jumlah		28,015,000	4,202,250	1,400,750	10,085,400	10,085,400	2,241,200

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (Kabupaten Blitar Dalam Angka 2016)

Lampiran 4. Dokumentasi

a. Pantai Tambakrejo



Keterangan : Foto Kios-kios didalam kawasan wisata Pantai Tambakrejo



Keterangan : Foto pasar Ikan didalam kawasan wisata Pantai Tambakrejo

b. Pantai Serang



Keterangan : Foto setelah wawancara bersama kepala BUMDes Desa Serang selaku pengelola tempat wisata



Keterangan : Foto kawasan wisata Pantai Serang

c. Pantai Jolosutro



Keterangan : Foto Pantai Jolosutro dari atas bukit



Keterangan : Foto akses jalan menuju Pantai Jolosutro

